

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM HAL PEMBAGIAN BATAS LAUT WILAYAH INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE PASCA REFERENDUM TAHUN 1999.



OLEH

MUHAMMAD FACHRI

B111 11 164

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM HAL PEMBAGIAN
BATAS LAUT WILAYAH INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE PASCA
REFERENDUM TAHUN 1999.**

OLEH :

MUHAMMAD FACHRI

B111 11 164

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Bagian Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
MAKASSAR
2015**

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM HAL PEMBAGIAN
BATAS LAUT WILAYAH INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE PASCA
REFERENDUM TAHUN 1999

Disusun dan diajukan oleh


MUH.FACHRI
B111 11 164

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari rabu, 4 Maret 2015
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Alma Manuputty S.H., M.H.
NIP. 194603121969022001


Dr. Marcel Hendrapati S.H., M.H.
NIP. 195010271980031002

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

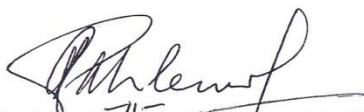
Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Muhammad Fachri
No. Pokok : B111 11 164
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM
HAL PEMBAGIAN BATAS LAUT WILAYAH
INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE PASCA
REFERENDUM TAHUN 1999.**

Telah Diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Januari 2015

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Ny. Alma Mahuputty S.H., M.H.

NIP : 194603121969022001

PEMBIMBING II



Dr. Marcel Hendrapati, S.H., M.H.

NIP : 195010271980031002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **MUH. FACHRI**

No. Pokok : B111 11 164

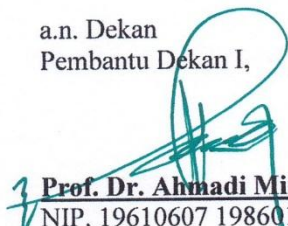
B a g i a n : Hukum Internasional

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Internasional dalam Hal Pembagian
Batas Laut Wilayah Indonesia dengan Timor Leste
Pasca Referendum Tahun 1999

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2015

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

MUHAMMAD FACHRI, B111 11 164, Tinjauan Hukum Internasional Dalam Hal Pembagian Batas Laut Wilayah Indonesia dengan Timor Leste Pasca Referendum Tahun 1999. (Dibimbing Oleh Alma Manuputty, selaku Pembimbing I dan Marcel Hendrapati, selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pengaturan hukum internasional dan hukum nasional dalam menetapkan batas laut wilayah Indonesia dengan Timor Leste. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal menyelesaikan masalah perbatasan dengan Timor Leste.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan deduktif, dengan tehnik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara melalui instansi terkait, dan data sekunder dari referensi-referensi (buku, jurnal dan website) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deduktif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Perpustakaan Kementerian Luar Negeri dan Kantor Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial.

Dari hasil penelitian sejak tahun 2002 sampai 2014 fokus utama pemerintah Indonesia dalam hal menyelesaikan masalah wilayah perbatasan khususnya di Timor Leste, hanya di sekitaran batas wilayah darat namun di tahun 2005 kedua negara telah menyepakati sebuah perjanjian sementara (*Provisional Agreement*) guna meredam konflik yang sering terjadi di kedua negara tersebut. Perjanjian bertahan sampai 2013 dengan menyisahkan tiga *main border* bermasalah. Sulitnya menetapkan batas wilayah tersebut dikarenakan adanya kesamaan latar belakang masyarakat diantara kedua negara tersebut seperti geografis, sosial dan budaya. Upaya diplomasi masih terus dilakukan agar penyelesaian batas kedua negara tersebut bisa teratasi. Ditahun 2015 pemerintah Indonesia dengan pemerintah Timor Leste sepakat bertemu guna membahas batas wilayah maritim, pemerintah Indonesia yang telah memiliki akan mengusulkan sebuah konfigurasi peta yang telah dibuatnya sejak tahun 2005 dengan menggunakan metode *equidistant* di hampir semua titik garis pangkal kepulauan yang telah di setujui melalui perjanjian sementara sedangkan *equitable principle* digunakan di sekitar pulau Atauro dikarenakan celah antara pulau milik Indonesia dengan Timor Leste sangatlah sempit.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah rabbil alamin

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya serta karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik, Penulis menyadari bahwa hanya dengan petunjuk-Nya jugalah sehingga kesulitan dan hambatan dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dalam kehidupan yang penuh dengan kebaikan serta menunjukkan jalan dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak menemui hambatan dan tantangan baik yang sifatnya teknis maupun non teknis. Hanya dengan modal semangat dan keyakinan yang teguh dengan dilandasi usaha dan berdoa maka kendala-kendala tersebut dapat Penulis atasi dengan baik.

Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun (konstruktif) demi penyempurnaannya dimasa mendatang.

Tak lupa pula penulis menghaturkan banyak terima kasih dan sembah sujud kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Dr.H.M. Ramli Haba S.H.,M.H yang menjadi idola penulis dunia akhirat, yang memberikan banyak pelajaran kepada penulis mulai dari hakikat organisasi, hakikat ilmu serta hakikat kehidupan sehingga penulis dapat memahami esensi dari kehidupan yang fana ini. Dan kepada Ibunda Hj. Nurhaedah S.H yang telah mendidik, membesarkan serta mengiringi setiap langkah penulis dengan do'a serta restunya yang tulus.

Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih kepada kakak tercinta drg.HJ.Ellyda Nur Fajri Ramli S.Kg dan dr.H.Achmad Muchlas Ramli S.Ked. yang telah memberi semangat yang tulus buat penulis dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ny. Alma Manuputty SH.MH. selaku Pembimbing I dan Dr. Marcel Hendrapati, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis didalam penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H.,M.H., Dr. Laode Abd Gani, S.H.,M.H., Inneke Lihawa, S.H.,M.H. selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat berharga demi kebaikan penulis dan kesempurnaan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Farida Patitingi S.H.,M.Hum., Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H., Dr. Syamsuddin Mochtar, S.H.,M.H., dan Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Dekan dan Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H.,M.H selaku Penasehat Akademik yang dengan sabar dan penuh tanggung jawab memberikan petunjuk yang sangat bernilai bagi penulis.
5. Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H.,M.H., dan Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A. selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Internasional.
6. Guru Besar, Dosen, dan Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Syamsu Rizal MI selaku Wakil Walikota Makassar yang telah memberikan fasilitas penginapan di Kantor Perwakilan Pemerintah Kota Makassar selama saya melakukan penelitian.
8. HJ.Suebah dan HJ.Subaedah yang membantu segenap proses penelitian dan proses penulisan skripsi
9. Para sahabat seperjuangan Selama Penelitian di Jakarta Rahmatulla Susanto, Nurfaika Ishak, Nur Fitriani Khaerunisa, kenangan kita selama penelitian merupakan pintu gerbang kita menghadapi masa depan yang indah.
10. Para sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Unhas, Yunus, Yarham, Iccang, Faisal, Suwandy, Rizqa, Dwi, Aya, Wesa, Fia, Trie, Chika, Izzah, kak nilda
11. Teman-teman KKN Gel.87 Unhas Posko Induk Kecamatan Patimpeng, Aso, Irfan, Adhy, Uland, Ayu, Indri, Tina, semoga kita tetap kompak selalu.
12. Teman-teman MPM Fakultas Hukum Unhas, Asraf, Wahyu, Yusran, Aswal, Iqbal, Yahya.
13. Teman-teman Bagian Hukum Internasional, Nita, Yayu, Bobby, Afdal, Mhul, Mumu, Dini, Eden, Rere, Icha, Meita, Adit, Gaby, Mirdha, Kak Riyadh.
14. Keluarga Besar *Mediasi 2011*, kita akan tetap menjadi keluarga selamanya.
15. Keluarga Besar Tapak Suci Cabang Tallo.
16. Keluarga Besar PMR unit 204 Makassar
17. Terkhusus kepada Kakanda Abd.Rahman Mangkana, Nursalam Tacong, Ashabul Kahfi, Andi Imam Wahyudi, S.H., Hidayat Pratama Putera, S.H., Muh. Al-Imran S.H., Mulhadi S.H., Syafaat Anugrah Pradana S.H. Muh. Afif Mahfud, S.H. atas bantuannya kepada penulis selama pembuatan skripsi ini.

18. Terima Kasih Buat Bapak Ir. Eko Artanto selaku Surveyor Penata Madya yang meluangkan waktunya dalam memberikan data terhadap penelitian saya.
19. Terkhusus Kepada Rizki Febrisari yang selama ini membantu saya dalam penulisan serta pengeditan skripsi saya.
20. Segenap pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu atas bantuan, dukungan, kerjasama, dan semangat yang sangat berharg bagi penulis dan Jika suatu hari nanti. Entah besok atau kapan saja, kita berpisah dan tidak bertemu lagi. Ketahuilah hadiah terindah yang pernah penulis dapat adalah mengenal kalian semua.

Atas segala bantuan, kerja sama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini, tak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis. Namun melalui doa dan harapan dari penulis semoga amal kebajikan yang telah disumbangkan dapat diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Sang Maha Sempurna Pemilik Segalanya, Allah SWT.
Aamiinn..

Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan maksimal mungkin, skripsi tentunya tidak luput dari kekurangan. Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya, Aaamiinn..
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 04 Maret 2015

Muhammad Fachri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Sejarah Konvensi Hukum Laut III	9
2.1.1. Fungsi dan Tujuan Konvensi Hukum Laut III.....	11
2.2. Sejarah Perkembangan Hukum Laut Indonesia	14
2.2.1. Pra Kemerdekaan.....	14
2.2.2. Pasca Kemerdekaan.....	15
2.3. Cara Pengukuran Kedaulatan Laut Wilayah	19
2.4. Sejarah Sengketa Perbatasan Laut Indonesia dengan Timor Leste	22
2.5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional	28
2.5.1. Secara Damai/Diplomatik	28
2.5.1.1. <i>Negosiasi</i>	28
2.5.1.2. <i>Mediasi Dan Jasa-Jasa Baik</i>	39

2.5.1.3. <i>Pencarian Fakta</i>	30
2.5.1.4. <i>Konsiliasi</i>	30
2.5.2. Secara Hukum	31
2.5.2.1. <i>Mahkamah Internasional Hukum Laut</i>	32
2.5.2.2. <i>Mahkamah Internasional</i>	34
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian.....	35
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	36
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.4. Analisis Data.....	37
BAB 4 PEMBAHASAN	
4.1. Kondisi Geografis Timor Leste.....	37
4.2. Konsepsi Wilayah Perbatasan.....	41
4.2.1. Klasifikasi Wilayah Perbatasan.....	46
4.2.2. Prinsip Hukum Internasional Dalam Penetapan Perbatasan Negara.....	49
4.3. Penetapan Batas Maritim Antara Republik Indonesia dan Timor Leste.....	51
4.4. Penetapan Batas Laut Wilayah Menurut Hukum Nasional.....	56
4.5. Upaya Pemerintah Dalam Menyelesaikan Masalah Perbatasan Dengan Timor Leste.....	64
BAB 5 PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	75
5.2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laut merupakan bagian terluas di permukaan bumi karena $\frac{3}{4}$ permukaan bumi merupakan laut yang menghubungkan satu negara dengan negara lain. Selain merupakan jalur yang menghubungkan antar negara, saat ini pemanfaatan laut semakin hari semakin pesat perkembangannya dalam hal perikanan maupun pertambangan yang terkandung di kawasan dasar laut (*sea bed*). Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang mengatur batas wilayah zona-zona maritim maupun pemanfaatan kawasan dasar laut.

Hukum laut pada pokoknya hanya mengatur kegiatan-kegiatan di atas permukaan laut, tetapi perhatian juga telah diarahkan pada dasar laut dan kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya. Hukum laut yang dulunya bersifat *unidimensional* sekarang telah berubah menjadi *pluridimensional* yang sekaligus mengubah filosofi dan konsepsi hukum laut di masa lalu.¹

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Indonesia memiliki wilayah perairan terbesar di dunia dan dua pertiga dari wilayahnya merupakan wilayah perairan. Secara geografis Indonesia merupakan negara maritim, yang memiliki luas laut sebesar 5,8 Juta km² yang terdiri dari laut territorial

¹ Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni: Bandung, hlm. 304

dengan luas 0.8 juta km², laut nusantara 2.3 juta km² dan zona ekonomi eksklusif 2.7 juta km². Disamping itu, Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km².²

Hukum internasional telah memberikan kontribusi besar dalam menciptakan keadilan bagi setiap negara dengan mengatur secara internasional kegiatan pemanfaatan laut untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam dan pengklaiman batas laut wilayah secara berlebihan. Selain melakukan perjanjian internasional antar negara. Berbagai upaya juga dilakukan dalam melaksanakan pemerataan keadilan dan pemanfaatan sumber daya alam khususnya di kawasan dasar laut yang terletak di wilayah ZEE (*Zona Ekonomi Eksklusif*). Upaya tersebut melahirkan Konvensi Hukum Laut III Tahun 1982 (*the Third United Nation Convention Law of the Sea III*). Konvensi inilah yang menjadi pelopor lahirnya Hukum Internasional yang membahas mengenai laut sampai sekarang ini.

Konvensi ini salah satu konvensi terbesar yang pernah diselenggarakan *United Nations* (UN) karena dihadiri lebih 160 negara, dengan sekitar 5000 anggota delegasi dengan bermacam latar belakang, yaitu diplomat, ahli hukum, pertambangan, perikanan, perindustrian, kelautan, perkapalan, lingkungan alam, dan lain-lain. Terpanjang, karena konvensi ini berlangsung selama sembilan tahun dari Desember 1973 sampai September 1982, yang keseluruhannya berjumlah 12 sidang

² Sekretariat Jendral Satuan Kerja Dewan Kelautan, 2008, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS III) di Indonesia*, Jakarta, hlm. 1

sekitar 90 minggu. Terpenting, karena bukan saja hasil yang dicapai tetapi berkat adanya kemauan bersama untuk berhasil betapapun banyak dan rumitnya permasalahan yang harus diatasi.³

Meskipun *the Third United Nation Convention Law of the Sea* (UNCLOS III) salah satu konvensi terbesar dan terpanjang tidak menutup kemungkinan masalah-masalah dalam hukum laut tidak ada. Oleh sebab itu, masalah di laut menjadi sangat kompleks khususnya di bidang hukum laut. Hal ini disebabkan banyaknya negara merdeka khususnya Timor Leste pasca referendum di tahun 1999.

Negara Timor Leste merupakan negara yang merdeka pada abad 21 tahun 2002 Timor Leste mempunyai nama resmi internasional yaitu Republica Democratica de Timor Leste. Timor Leste merupakan pecahan dari negara Indonesia, perjuangan kemerdekaan Timor Leste tidak begitu mudah dan mempunyai sejarah panjang. Negara tersebut sempat dijajah oleh tiga negara yaitu Portugis selama 450 tahun, Jepang selama 3 tahun dan Indonesia selama 24 tahun.

Lepasnya Timor Leste dari negara Indonesia tidak lepas dari tindakan Presiden B.J.Habibie yang melakukan referendum terhadap warga Timor Leste pada tanggal 27 Januari 1999. Dalam referendum tersebut mempunyai dua opsi, yaitu :

1. Pemberian otonomi khusus;

³ Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 309

2. Pemisahan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 dalam naungan Indonesia.

Pasca pelepasan Timor Leste dari Indonesia mulai menimbulkan masalah baru di antara kedua negara tersebut khususnya mengenai Tapal Batas, pembagian batas wilayah laut serta pemanfaatan ZEE (*Zona Ekonomi Eksklusif*).

Sejak tahun 2002, Pemerintah Timor Leste mengesahkan Undang-undang Batas Wilayah sekaligus menetapkan perluasan wilayah maritim secara sepihak. Ironisnya perluasan wilayah lautnya dilakukan dengan menetapkan zona ekonomi eksklusifnya sehingga adanya tumpang tindih antara beberapa pulau di Indonesia dan Timor Leste khususnya di perairan selat Ombai, selat Wetar dan beberapa pulau di sekitar Timor Leste dan Indonesia.

Padahal sebenarnya sebagai negara pantai (*Coastal State*) yang telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dan wilayah lautnya tumpang tindih dengan negara tercinta, negara yang dulunya pernah menjadi provinsi ke 27 Republik Indonesia hanya berhak menetapkan wilayah lautnya dengan menerapkan prinsip garis tengah (*Median Line*) dan ini berarti wilayah lautnya terhitung dari pantai atau garis pangkal negeri kecil tersebut.⁴

Berbeda dengan Malaysia atau Australia, mungkin jarang sekali kita mendengar isu perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste.

⁴ Marcel Hendrapati, *Pemetaan Garis Pangkal Kepulauan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum, Vol 15 Nomor 2 Juni 2007, hlm. 185-196

Kenyataannya, Timor Leste adalah negara terdekat yang bahkan berbagi daratan dengan Indonesia. Secara geografis kondisi perbatasan Indonesia dengan Timor Leste mirip dengan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Keduanya melibatkan batas darat dan laut, seperti juga antara Indonesia dengan Papua Nugini. Sejak pertengahan 2012, Taur Matan Ruak resmi menjabat sebagai Presiden Timor Leste periode 2012-2017. Ruak menggantikan Ramos Horta yang kalah dalam pemilihan presiden di putaran pertama. Yang menarik, salah satu pernyataan pertama Presiden Ruak adalah terkait batas maritim, terutama dengan Australia. *Sydney Morning Herald* (17 April 2012) melansir pernyataan Ruak yang cukup keras bahwa dia akan “pasang kuda-kuda” terkait isu perbatasan. Ruak mengatakan “Saya melihat Australia selalu jadi masalah dalam negosiasi karena menginginkan bagian yang lebih banyak. Sebagian besar kesepakatan Australia mengutamakan aspek politis, bukan negosiasi legal”. Presiden Timor Leste ini jelas memberi perhatian tinggi pada isu perbatasan.

Tahun 2004 silam Ramos Horta berada di Sydney yang sedang melakukan kunjungan luar negeri. Sebagai Menteri Luar Negeri, Horta menyampaikan pidato simpatik didepan pengacara, profesional, akademisi dan pekerja pemerintah Australia. Intinya dia menyampaikan keprihatinan Timor Leste atas kesepakatan yang adil antara Timor Leste dan Australia terkait pemanfaatan sumber daya di Laut Timor. Peraih nobel perdamaian ini berhasil memukau hadirin sore menjelang malam itu.

Dalam kesempatan lain, Mari Alkatiri, Presiden Timor Leste ketika itu bahkan mengistilahkan penetapan batas maritim dengan Australia adalah perihal “hidup atau mati” bagi Timor Leste, seperti dikutip dalam laporan *Oxfam* tahun 2004. Bisa dipahami, kejelasan batas maritim akan menentukan akses Timor Leste pada minyak dan gas bumi di Laut Timor sebagai salah satu urat nadi perekonomiannya.⁵

Tanpa minyak dan gas bumi, Timor Leste sulit meningkatkan laju perekonomiannya. Ada benang merah ketika menyimak pernyataan para pemimpin Timor Leste. Semuanya menunjukkan kepedulian yang tinggi kepada batas maritim. Jika keinginannya terkait batas maritim dengan Australia sedemikian jelas, begitu pula keinginan pemerintah Timor Leste dalam halnya pembagian batas wilayah maritim dengan Indonesia.

Masalah ini sampai sekarang menjadi polemik dan belum menemukan benang merah dalam permasalahan ini karena masih menunggu penyelesaian sengketa darat rampung, sehingga sengketa batas maritim hingga sampai sekarang masih terbengkalai. Berdasarkan permasalahan ini kita bisa lihat peran pemerintah dalam hal negosiasi masalah batas maritim ini.

Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti kasus ini agar semua bisa tahun upaya-upaya penyelesaian sengketa hukum laut internasional. Sehingga penulis mau membuat kajian ini dalam bentuk skripsi yang

⁵ I Made Andi Arsana, 2012, *Menetapkan Batas Maritim dengan Timor Leste*, Di akses dari: <http://puzzleminds.com/menetapkan-batas-maritim-dengan-timor-leste-2/> [12 April 2014]

berjudul ***“Tinjauan Hukum Dalam Hal Pembagian Batas Laut Wilayah Indonesia Dengan Timor Leste Pasca Referendum Tahun 1999”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, untuk memfokuskan penulisan skripsi ini maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum internasional dan hukum nasional dalam menetapkan batas laut wilayah Indonesia dengan Timor Leste?
2. Upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah perbatasan dengan Timor Leste.?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum internasional dan hukum nasional dalam menetapkan batas laut wilayah Indonesia dengan Timor Leste.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal menyelesaikan masalah perbatasan dengan Timor Leste.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Secara Akademis/Teoritis

Diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun dan mengembangkan hukum internasional khususnya di bidang hukum laut internasional.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat dalam hal penyelesaian sengketa internasional dengan negara tetangga.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sejarah Konvensi Hukum Laut III

Pada tanggal 30 April 1982 ketika itu Ketua Konferensi Hukum Laut III menggambarkan pengesahan rancangan konvensi sebagai suatu “pertemuan dengan sejarah”. Pengesahan yang dilakukan setelah melalui proses selama delapan tahun di dalam draft rancangan Konvensi Hukum Laut III, atau empat belas tahun setelah Arvid Pardo, Duta Besar Malta untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, meminta perhatian akan pentingnya pembentukan rezim hukum baru untuk dasar laut dalam.

Konvensi ini merupakan salah satu konvensi terbesar, terpanjang, terpenting yang pernah diselenggarakan *United Nations* (UN) karena dihadiri lebih 160 negara, dengan sekitar 5000 anggota delegasi dengan bermacam latar belakang disiplin ilmu, yaitu diplomat, ahli hukum, pertambangan, perikanan, perindustrian, kelautan, perkapalan, lingkungan alam, dan lain-lain. Terpanjang, karena konvensi ini berlangsung selama sembilan tahun dari Desember 1973 sampai September 1982, yang keseluruhannya berjumlah 12 sidang sekitar 90 minggu. Terpenting, karena bukan hanya hasil yang dicapai tetapi dengan adanya kemauan bersama para peserta konvensi untuk mencapai suatu tujuan, betapapun banyak dan rumitnya permasalahan yang harus diatasi.

Lahirnya konvensi hukum laut yang baru ini merupakan hasil dari upaya masyarakat internasional selama 14 tahun, yaitu semenjak didirikannya *Ad Hoc Committee* bulan Desember 1967. Konvensi baru tersebut juga merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang yang pada umumnya buat pertama kali betul-betul aktif berpartisipasi dalam merumuskan berbagai ketentuan yang mencerminkan kepentingan mereka dibidang hukum laut berbeda dengan konferensi-konferensi tahun 1958 dan 1960. Selain itu pula, sesuai pasal 308, konvensi mulai berlaku 12 bulan setelah tanggal didepositkannya piagam ratifikasi atau aksesi yang ke-60. Konvensi tersebut telah mulai berlaku semenjak tanggal 16 November 1994 dan sampai bulan Juli 2004 telah diratifikasi oleh 145 negara.⁶

Bagi Indonesia penanda-tanganan konvensi ini sangat penting, karena dengan demikian konvensi telah memberikan landasan hukum internasional bagi kepentingan-kepentingan Indonesia yang menyangkut kepentingan internasional. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang No 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) pada tanggal 31 Desember 1985, Indonesia telah menyatakan dirinya terikat oleh ketentuan-ketentuan konvensi tersebut. Oleh karena itu, diharapkan bahwa langkah selanjutnya bagi Indonesia

⁶ Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 311

adalah untuk melaksanakan dan menuangkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional.⁷

2.1.1. Fungsi dan Tujuan Konvensi Hukum Laut III

Konvensi Hukum Laut baru ini merupakan penjelmaan dari upaya untuk mewujudkan rezim hukum yang mengatur sekitar 70% dari keseluruhan luas permukaan bumi. Dan lebih penting lagi dari presentase luas tersebut adalah kenyataan dimana sekarang peranan laut semakin besar, yaitu sebagai sumber makanan, energi dan bahan mentah. Sebagai contoh, jumlah tangkapan ikan dunia meningkat dari 20 juta ton pada tahun 1950 menjadi 70 juta ton pada tahun 1970, dan apabila jenis-jenis ikan yang belum dieksploitasi juga dimanfaatkan, maka jumlah tersebut akan lebih meningkat lagi.⁸

Penambangan minyak dan gas bumi dari dasar laut yang belum begitu dikenal pada masa sebelum Perang Dunia II kini telah mencapai 20% dari keseluruhan produksi dunia. Jumlah ini pun akan semakin meningkat, apabila penambangan dari dasar laut yang lebih dalam lagi mempunyai nilai ekonomis. Disamping itu teknik baru untuk menambah energi dari laut kini sudah mulai dikembangkan (seperti dari perbedaan suhu air laut).⁹

⁷ Etty R. Agoes, 1991, *Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Abardin: Bandung, hlm. 1-2

⁸ Albert W. Koers, 1991, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, hlm. 1

⁹ *Ibid.*,

Disisi lain keuntungan yang diperoleh dari Konvensi Hukum Laut III ini antara lain :

1. Kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang ada, misalnya kebebasan-kebebasan di laut lepas dan hak lintas damai di laut tertorial;
2. Pengembangan hukum laut yang sudah ada, seperti ketentuan lebar laut teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria landas kontinen;
3. Penciptaan aturan-aturan baru, seperti asas negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif dan penambangan di dasar laut internasional.¹⁰

Secara otomatis dengan adanya beberapa peraturan-peraturan baru dalam Konvensi Hukum Laut III, perlu digaris bawahi adanya resiko baru yang muncul dalam aturan tersebut khususnya konsep negara kepulauan menimbulkan suatu pertentangan dengan konsepsi kepulauan suatu negara. Namun persoalan tersebut dengan mudah diatasi yaitu dengan mengadakan pertemuan para pejabat diplomatik sehingga diplomasi bisa berjalan dengan lancar.

Negara-negara yang langsung berkepentingan dengan prinsip negara kepulauan dapat kita bagi dalam beberapa golongan sebagai berikut :¹¹

¹⁰ T.May Rudy, 2009, *Hukum Internasional 2*, Refika Adiatama: Bandung, hlm. 18

1. Negara-negara tetangga yakni anggota-anggota ASEAN dan negara tetangga lainnya termasuk Australia;
2. Negara yang mempunyai kepentingan perikanan dan komunikasi (kabel telekomunikasi di dasar laut). Jepang termasuk golongan ini karena telah melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia sejak sebelum perang;
3. Negara maritim. Negara-negara ini berkepentingan agar lalu lintas maritim tidak mengalami gangguan. Dalam golongan ini dapat dimasukkan negara yang memiliki armada niaga yang kebanyakan terdiri dari negara maju, misalnya negara-negara di Eropa Barat. Dalam kelompok ini negara Skandinavia mempunyai kedudukan khusus karena sejak konferensi Hukum Laut Jenewa, negara-negara ini dipelopori oleh Norwegia selalu memperlihatkan sikap yang penuh pengertian terhadap konsepsi negara kepulauan;
4. Negara maritim besar yang mempunyai kepentingan strategi militer. Termasuk golongan ini negara Amerika Serikat dan Uni Sovyet.

Diantara berbagai macam golongan fokus utama konsep negara kepulauan yang diusulkan Indonesia terletak pada poin pertama mengenai permasalahan mengenai masalah perbatasan dengan negara tetangga, terutama negara anggota ASEAN. Dalam hal ini sengketa perbatasan

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut Ke-III (Statement on the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Jurnal Hukum Internasional*, Fakultas Hukum, Vol 1 Nomor 1 Oktober 2003, hlm. 1-35.

wilayah maritim antara Indonesia dengan Timor Leste, meskipun Timor Leste bukan merupakan negara ASEAN, namun Timor Leste merupakan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

2.2. Sejarah Perkembangan Hukum Laut Indonesia

2.2.1. Pra Kemerdekaan

Sebelum merdeka, Indonesia bergantung pada produk hukum kolonial, jadi hampir semua produk hukum pada waktu itu mengikuti hukum Belanda khususnya hukum laut yang berlaku di Indonesia. *Teritoriale Zee Maritime Kringen Ordonatie* (TZMKO) merupakan salah satu produk hukum kolonial yang mengatur tentang laut wilayah, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh sebab itu, dapat merugikan negara Indonesia di kala itu. Hal ini karena pengaturan hukum laut pada saat itu hanya mengatur lebar laut wilayah hanya sejauh 3 mil atau setara ukuran dari jarak tembakan meriam, sehingga melebihi dari jarak yang telah ditentukan merupakan laut bebas sehingga negara-negara bisa mengklaim laut bebas tersebut.

Peraturan ini, memunculkan celah lautan bebas di tengah-tengah wilayah negara yang membuat kapal-kapal asing dapat berlayar secara bebas dan aman. Peraturan itu juga berlaku bagi kapal-kapal perang Belanda yang tidak mungkin dilarang oleh Indonesia. Kapal-kapal Belanda dapat dengan bebas mengarungi perairan laut bebas di antara pulau-pulau di Indonesia karena memang hukum laut Internasional yang berlaku

saat itu masih produk hukum Belanda di kala itu sehingga dapat menguntungkan Belanda dari pelayaran.

Indonesia tidak memiliki hak untuk melarangnya apalagi kekuatan Angkatan Laut Indonesia masih jauh ketinggalan dengan Belanda. Keberadaan laut bebas di antara pulau-pulau di wilayah Negara Republik Indonesia jelas sangatlah merugikan Indonesia pada waktu itu yang notabene sebagai negara kepulauan. Bagaimanapun penduduk antara satu pulau dengan pulau lainnya masih satu bangsa, sehingga tidak mungkin sebuah negara yang berdaulat dipisah-pisahkan oleh laut bebas sebagai pembatasnya. Oleh sebab itu, mulai muncullah sebuah pemikiran untuk merombak sistem hukum laut peninggalan Belanda tersebut.

2.2.2. Pasca Kemerdekaan

Hampir dua dekade Indonesia merdeka pada waktu itu peraturan TZMKO masih dijalankan, merasa dirugikan Indonesia dikala itu yang dipimpin oleh Ir.Djuanda mengeluarkan pengumuman kepada pemerintah melalui deklarasi secara sepihak yang berisikan mengenai pembagian laut wilayah sebesar 12 mil dan diaturnya negara kepulauan (*Archipelago State*) deklarasi ini dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 1957. Setelah diumumkannya Deklarasi Djuanda 1957 pemerintah dikala itu berinisiatif membuat undang-undang yang membahas mengenai masalah kelautan setelah tiga tahun bergulir pada tahun 1960 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 04 Tahun 1960 tentang Perairan

Indonesia, maka prinsip negara kepulauan menjadi hukum positif di Indonesia.

Seperti dikatakan tadi, pengumuman pemerintah tertanggal 13 Desember 1957, yang mengandung suatu pengumuman tentang konsep Wawasan Nusantara telah menjadi hukum positif di Indonesia. Adapun maksud Indonesia masih harus memperjuangkannya melalui konvensi hukum laut ialah hanya hendak menjelaskan kepada dunia internasional bahwa prinsip Wawasan Nusantara bukanlah sesuatu yang baru dalam hukum internasional. Prinsip itu timbul dari kebutuhan yang khusus dan nyata dari bangsa Indonesia untuk menjamin kesatuan nasional, kestabilan politik, keamanan nasional dan kemajuan ekonomi bagi bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu juga hendak menjelaskan kepada dunia internasional sebab masalah "*right of innocent passage*" di laut teritorial dijamin oleh hukum internasional sedangkan di perairan pedalaman dijamin oleh hukum Indonesia.¹² Akan tetapi, dalam hal menyakinkan kepada dunia internasional mengenai konsep Negara Kepulauan tidaklah begitu gampang salah satunya negara paman sam Amerika Serikat menentang keras tentang konsep Negara Kepulauan. Dalam tahap memperjelas inilah harus diadakan suatu penilaian atas sikap negara peserta terhadap asas negara kepulauan.

¹² Frans E. Likadja, 1987, *Bunga Rampai Hukum Internasional*, Binacipta: Bandung, hlm. 64

Negara-negara yang langsung berkepentingan dengan prinsip negara kepulauan dapat kita bagi dalam beberapa golongan sebagai berikut:

1. Negara-negara tetangga yakni anggota-anggota ASEAN dan negara-negara tetangga lainnya termasuk Australia;
2. Negara yang mempunyai kepentingan perikanan dan komunikasi (kabel telekomunikasi di dasar laut). Jepang termasuk golongan ini karena telah melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia sejak sebelum perang;
3. Negara maritim. Negara-negara ini berkepentingan agar lalu lintas maritim tidak mengalami gangguan. Dalam golongan ini dapat dimasukkan negara yang memiliki armada niaga yang kebanyakan terdiri dari negara maju, misalnya negara-negara di Eropa Barat. Dalam kelompok ini negara Skandinavia mempunyai kedudukan khusus karena sejak Konvensi Hukum Laut Jenewa, negara-negara ini dipelopori oleh Norwegia selalu memperlihatkan sikap yang penuh pengertian terhadap konsepsi negara kepulauan;
4. Negara maritim besar yang mempunyai kepentingan straregi militer.

Termasuk golongan ini negara Amerika Serikat dan Uni Sovyet.¹³

Melalui suatu perjuangan panjang dan bersejarah di kancah internasional, pada tahun 1982, konsep Negara Kepulauan (*Archipelago State*) yang dipelopori Indonesia berhasil mendapat pengakuan di dunia

¹³Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*, Alumni: Bandung, hlm. 25-26

internasional dalam konvensi PBB tentang hukum laut. Pada 18 Desember 1996 di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, Presiden BJ Habibie dikala itu sebagai Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) membacakan pidato Presiden Soeharto yang dikenal dengan pembangunan “Benua Maritim Indonesia”. Selanjutnya pada tahun 1998 Presiden BJ Habibie mengumumkan rencana pembangunan disektor kelautan Indonesia yang dikenal dengan “Deklarasi Bunaken”. Inti dari deklarasi tersebut adalah laut merupakan peluang, tantangan dan harapan untuk masa depan persatuan, kesatuan dan pembangunan bangsa Indonesia. Setelah berakhirnya masa Orde Baru, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berkomitmen terhadap pembangunan kelautan. Komitmennya dalam membangun pemerintah di sektor kelautan, diwujudkan dengan dibentuknya Departemen Eksplorasi Laut pada tanggal 26 Oktober 1999 dan menempatkan Sarwono Kusumaatmadja sebagai menteri pertama. Pada bulan Desember nama departemen ini berubah nama menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, dan sejak awal tahun 2001 berubah lagi menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) hingga sekarang.

Perkembangan hukum laut di Indonesia di pasca reformasi tidaklah begitu pesat dibandingkan dengan masa Orde Lama dan Orde Baru dikarenakan pada masa itulah mulai muncul pemikiran-pemikiran baru mengenai konsepsi hukum laut modern sehingga sampai sekarang masih digunakan peraturan tersebut.

2.3. Cara Mengukur Batas Kedaulatan Laut Wilayah

Berbicara mengenai kedaulatan atas laut merupakan hal yang sangat rentan terjadinya suatu konflik dengan negara-negara tertentu khususnya negara pantai (*coastal state*). Seperti kita ketahui salah satu unsur terpenting suatu negara salah satunya ialah kedaulatan (*sovereignty*), batas kedaulatan daratan gampang diatur bagi negara karena mudah diatur dalam proses penetapan karena kita tahu ukuran luas tanah tersebut yang sering kita diami lokasi tersebut.

Beda halnya dengan laut dimana dalam menetapkan batas kedaulatan suatu laut wilayah sangatlah sukar dalam menetapkan tanda batas yang bisa menandakan suatu laut wilayah di negara tersebut hal ini disebabkan laut tidak pernah didiami pada umumnya juga dalam membatasi suatu wilayah kedaulatan yang berupa laut sukar disebabkan oleh ukuran luas laut itu sendiri sulit di jangkau.

Tentang hal ini panitia hukum internasional dari PBB dapat menetapkan selaku suatu pasal dari hukum internasional yang harus dianggap berlaku. Sebagai titik tempat ini dikatakan dalam pasal 4 adalah garis air surut sepanjang pantai, yaitu tempat dimana tanah pesisir berhenti kelihatan pada waktu air surut (*along low water mark*), seperti di gambarkan dalam peta skala besar yang diakui kebenarannya secara resmi oleh negara pesisir yang bersangkutan (*coastal state*).¹⁴

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1970, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur Bandung: Sumur Bandung, hlm. 13

Lautan yang membentang luas dengan posisi untuk menghubungkan wilayah daratan satu dengan yang lain dan kemungkinan berlaku hukum yang berbeda, didasari atau tidak pada dasarnya setiap insan manusia mempunyai hak untuk menikmati kekayaan yang terkandung di dalamnya namun masalahnya sekarang bagaimana ketentuan yang mengatur masalah prosedur pemanfaatan kekayaan tersebut. Secara makro dapat digambarkan bahwa ada dua ketentuan yang dapat diterapkan berlakunya, yaitu:

1. Hukum nasional yang sepanjang wilayah lautan itu berada pada kekuasaan hukum nasional, suatu negara hal ini sudah barang tentu prosedur perizinan pun diatur di dalam hukum nasional yang bersangkutan;
2. Hukum internasional dimana dalam wilayah lautan tersebut tidak berada di bawah suatu negara sehingga pengaturannya dengan memperhatikan hukum internasional. Kedua ketentuan itu tidak bertentangan berlakunya, namun hukum nasional selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bersifat internasional.¹⁵

Akan tetapi, dalam hal menetapkan lebar laut teritorial suatu negara pantai sudah ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS III) yang dimuat dalam pasal 7 menjelaskan ketentuan cara penarikan garis pangkal (*straight base-lines*).

¹⁵ P. Joko Subagyo, 2005, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 21

Pada Pasal 7 Ayat 1 diatur, di bagian-bagian pantai mana dapat dipergunakan cara penarikan garis pangkal lurus, yakni: (1) di tempat-tempat dimana pantai banyak liku-liku tajam atau laut masuk jauh ke dalam; dan (2) apabila terdapat deretan pulau-pulau yang letaknya tak jauh dari pantai. Ayat 3,4,dan 5 memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan didalam menggunakan penarikan garis pangkal menurut sistem garis pangkal lurus dari ujung ke ujung.¹⁶

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut

1. Bahwa garis-garis lurus demikian tidak boleh menyimpang terlalu banyak dari arah umum pantai dan bahwa bagian laut yang terdapat pada sisi dalam (sisi darat) garis-garis demikian harus cukup dekat dengan wilayah daratan untuk diatur oleh rezim perairan pedalaman (ayat 3);
2. Garis-garis lurus tidak boleh ditarik di antara dua pulau atau bagian daratan yang hanya timbul di atas permukaan air apabila di atasnya telah didirikan mercusuar atau instalasi-instalasi serupa yang setiap waktu ada diatas permukaan air dan penarikan garis-garis lurus yang telah diakui secara internasional (ayat 4);
3. Bahwa dalam menetapkan garis pangkal lurus demikian dapat diperhatikan kebutuhan-kebutuhan istimewa yang bersifat ekonomis dari suatu daerah yang dapat dibuktikan oleh kebiasaan-kebiasaan dan kebutuhan yang telah berlangsung lama (ayat 5);

¹⁶ Dikdik M.Sodik, 2011, *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Refika Adiatama: Bandung, hlm. 24

4. Bahwa penarikan garis pangkal lurus tidak boleh dilakukan sedemikian rupa hingga memutuskan hubungan laut wilayah negara lain dengan laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.¹⁷

Akan tetapi, dalam proses penetapan laut teritorial antara Indonesia dan Timor Leste sampai sekarang belum bisa teratasi hal ini dikarenakan apabila kedua negara yang berselisih tersebut memakai cara yang telah ditentukan oleh Konvensi Hukum Laut III tahun 1982 dapat merugikan kedua negara tersebut. Namun apabila masalah ini dibiarkan begitu saja, laut wilayah Indonesia bisa juga di klaim oleh Timor Leste seperti halnya kasus pulau Sipadan dan pulau Ligitan yang telah direbut oleh Malaysia dan pulau Pasir yang juga lepas dan direbut sama Australia dan mengubah menjadi Ashmore Island.

2.4. Sejarah Sengketa Perbatasan Laut Indonesia Dengan Timor Leste

Timor Leste dengan Indonesia merupakan dua negara yang berbatasan sehingga dapat dikatakan negara tetangga yang memiliki batas wilayahnya masing-masing. Sejak lepasnya Timor Leste menjadi negara tersendiri tepat pada tahun 1999. Timor Leste dengan Indonesia memiliki sejarah yang panjang hingga saat ini masih merupakan dasar yang kuat bagi kedua negara untuk saling bekerjasama dan saling memberi kepercayaan, karena sebelumnya Timor Leste merupakan provinsi bagian dari negara Republik Indonesia. Sejak Timor Leste merdeka, secara resmi

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 24-25

Timor Leste berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia, yaitu dengan wilayah Nusa Tenggara Timur, Motain (NTT) secara khusus. Kawasan wilayah perbatasan antara negara Timor Leste dengan negara Indonesia termasuk dalam kategori wilayah yang rawan dan bersifat strategis.

Kerawanan yang timbul akibat dari adanya kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya antar kedua negara tersebut karena jarak batas antara Timor Leste dengan Indonesia sangat berdekatan, begitu pula penduduk masyarakat di perbatasan wilayah kedua negara bila ditinjau dari sejarahnya, memiliki kesamaan dalam berbahasa yaitu bahasa TeTum. Sehingga dapat menjadi dampak bagi aspek kepentingan nasional. Untuk itu perlu adanya perbedaan khusus garis batas wilayah kedua negara ini agar bisa mencegah bisnis gelap yang sering muncul secara tradisional di wilayah perbatasan karena akibat dari perselisihan harga barang yang dijual secara pasar gelap. Begitu pula ditinjau dari persaudaraan yang terjalin oleh masyarakat di wilayah perbatasan kedua negara ini jika dilihat dari sejarahnya yang memudahkan untuk saling berkomunikasi untuk memunculkan pasar gelap ini karena faktor ekonomi yang saat ini sulit untuk teratasi.

Timor Leste adalah sebuah negara kecil yang masih sangat memerlukan perhatian dan itu tidak hanya merupakan kewajiban pemerintah Timor Leste saja, akan tetapi juga merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat Timor Leste. Oleh karena itu, sangat penting mengkaji tentang kebijakan pemerintah Timor Leste dalam mengatasi masalah

perbatasan Timor Leste (Motain) dengan Indonesia. Timor Leste merupakan sebuah negara kecil yang baru merdeka, Timor Leste memiliki batas wilayah dengan negara Indonesia.

Dimana panjang garis perbatasan antara Timor Leste dan Indonesia adalah kurang lebih 279 kilometer yang masing-masing meliputi 710 titik di Kabupaten Belu, 3 titik di Kabupaten Kupang dan 5 titik di Kabupaten Timor Tengah Utara. Batas wilayah kedua negara tersebut merupakan sengketa bagi pertahanan keamanan bagi masing-masing wilayah kedua negara ini.

Timor leste merupakan sebuah negara yang merdeka di tahun 2002. Perjuangan rakyat Timor Leste di kala itu sangat berat karena pada waktu itu Timor leste masih bagian Negara Republik Indonesia sebagai provinsi ke 27, perjuangannya di perkuat dengan Australia dengan menjalin hubungan luar negeri bahkan sebelum Timor Leste belum merdeka.

Pada tanggal 25 Oktober 1989, Indonesia dan Australia memiliki kesepakatan dalam kerjasama pengelolaan minyak dan gas bumi yang terdapat di dasar laut di Laut Timor yang dinamakan Celah Timor (*Timor Gap*). Sesuai dengan ketentuan hukum yang ada maka tetap berlaku perjanjian kerjasama pengelolaan tahun 1989 dan kedua negara terikat untuk menerapkan perjanjian tersebut. Namun perjanjian tersebut terbentuk sebelum Timor Leste menjadi negara merdeka.¹⁸Namun upaya

¹⁸ Rawul Yulian Rahman, 2013, *Upaya Timor Leste Dalam Penyelesaian Garis Tapal Batas Dengan Australia*, **Jurnal Hubungan Internasional**, Vol. 1 Nomor 2, hlm. 275-276

perjanjian antara Indonesia dengan Australia di kala itu sudah tidak berlaku lagi di sebabkan Timor Leste lepas dari Indonesia 2002.

Setelah Timor-Timur atau Timor Leste menjadi negara merdeka dan berdaulat terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia maka perjanjian tersebut dengan sendirinya telah berakhir seiring dengan hilangnya kepentingan Indonesia atas bagian landas kontinen yang terletak di Celah Timor, karena objek yang diatur melalui perjanjian Celah Timor yang berada disebagian Laut Timor bukan lagi kepentingan Indonesia-Australia, melainkan kepentingan dari negara Timor Timur dan Australia. Akan tetapi, dengan berakhirnya perjanjian Celah timor, maka dibutuhkan perjanjian baru demi tercapainya kepastian hukum bagi kedua Negara (Timor Leste dan Australia) dan sekaligus menghindari konflik yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.¹⁹

Pasca pelepasan Timor Leste dari Indonesia mulai menimbulkan masalah baru di antara kedua negara tersebut khususnya mengenai Tapal Batas, pembagian batas wilayah laut serta pemanfaatan ZEE (*Zona Ekonomi Eksklusif*).

Sejak tahun 2002 Parlemen Timor Leste mengesahkan Undang-undang Batas Wilayah sekaligus menetapkan perluasan wilayah maritim secara sepihak. Ironisnya perluasan wilayah lautnya dilakukan dengan menetapkan zona ekonomi eksklusifnya kearah barat dan dan timur dari Celah Timor (*Timor Gap*) sehingga memasuki wilayah perairan Indonesia

¹⁹ *Ibid.*,

di Laut Timor dan terkesan mencaplok sumur minyak dan gas bumi Laminaria/Carolina di barat dan *Greater Sunrise* di sebelah Timur zona Timur Gap. Padahal sebenarnya sebagai negara pantai (*Coastal State*) yang telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dan wilayah lautnya tumpang tindih dengan negara tercinta, negara bekas provinsi ke 27 Republik Indonesia hanya berhak menetapkan wilayah lautnya dengan menerapkan prinsip garis tengah (*Median Line*) dan ini berarti wilayah lautnya hanya seluas zona Celah Timor terhitung dari pantai atau garis pangkal negeri kecil tersebut.²⁰

Penetapan wilayah maritim secara sepihak akan merugikan Indonesia di banyak hal. Oleh karena itu, pemerintah menolak keras Undang-undang Batas Wilayah yang di sahkan pemerintah Timor Leste secara sepihak. Dalam hal penetapan batas wilayah harus meminta persetujuan negara tetangga dalam hal penetapan ini agar tidak terjadi tumpang tindih batas wilayah.

Pemerintah Indonesia belum merundingkan batas maritim dengan sejumlah negara tetangga, termasuk Timor Leste, karena masih menunggu penyelesaian sengketa batas darat yang meliputi tiga sekmen di Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara. Titik-titik dasar sebagai penentuan garis batas maritim telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis

²⁰ Marcel Hendrapati, *Pemetaan Garis Pangkal Kepulauan Republik Indonesia*, Loc. Cit.,

Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. "Setelah perbatasan darat tuntas maka batas maritim baru akan dibahas," kata Komandan Satuan Survey Dinas Oceanografi dan Hidro TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut (Pelaut) Ferial Fachroni, di Kupang, Kamis 23 Juli 2009. Batas maritim tersebut terdiri dari batas laut wilayah (laut teritorial), batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas landas kontinental. Penentuan batas maritim ditentukan.²¹

Berdasarkan ketentuan hukum laut internasional atau UNCLOS 1982," katanya. Asisten Tata Pemerintahan Setda NTT, Yoseph Mamulak, yang dihubungi di Kupang, mengatakan, kendala utama yang menyebabkan lambatnya penyelesaian sengketa batas darat antara Indonesia dan Timor Leste, disebabkan oleh masalah hak ulayat antara masyarakat yang bermukim disekitar perbatasan kedua negara.²²

Sydney Morning Herald (17 April 2012) melansir pernyataan Ruak yang cukup keras bahwa dia akan "pasang kuda-kuda" terkait isu perbatasan. Ruak mengatakan "Saya melihat Australia selalu jadi masalah dalam negosiasi karena menginginkan bagian yang lebih banyak. Sebagian besar kesepakatan Australia mengutamakan aspek politis,

²¹ Amril Amarullah, 2009, *Batas Maritim Indonesia-Timor Leste Tak Jelas, Pemerintah Indonesia belum merundingkan batas maritim dengan sejumlah negara tetangga*, diakses dari <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/77313batas-maritim-indonesia-timor-leste-tak-jelas> [19 Juni 2014]

²² *Ibid.*,

bukan negosiasi legal.” Presiden Timor Leste yang baru ini jelas memberi perhatian tinggi pada isu perbatasan. Tahun 2004 silam.²³

Hal ini menyebabkan pemerintah tidak diam begitu menyikapi pernyataan Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak segala upaya dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal menyelesaikan sengketa perbatasan ini terkhusus batas wilayah laut namun hasilnya sampai sekarang belum mencapai kata sepakat.

2.5. Penyelesaian Sengketa Internasional

Relasi antara subjek hukum internasional sangat rentan untuk terjadinya suatu sengketa. Sengketa dapat lahir dari beragam sumber potensi, seperti perbatasan, sumber daya alam, merusakkan lingkungan, perdagangan, hak asasi manusia, terorisme, dan lain-lain. Pada saat sengketa tersebut timbul maka hukum internasional memainkan peran yang tidak kecil dalam penyelesaiannya.²⁴

Oleh karena itu dalam penyelesaian sengketa internasional memiliki dua mekanisme penyelesaian sengketa internasional yaitu :

1. Secara Damai/Diplomatik

2. Secara Hukum

2.5.1. Secara Damai/Diplomatik

2.5.1.1. Negosiasi

²³ | Made Andi Arsana, 2012, *Menetapkan Batas Maritim dengan Timor Leste*, Op.Cit.,

²⁴ Hilton Tarnama Putera dan Eka An Aqimuddin, 2011, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Asean Lembaga dan Proses*, Graha Ilmu: Yogyakarta, hlm. 1

Negosiasi atau perundingan adalah cara penyelesaian sengketa yang paling penting dan banyak ditempuh, serta efektif dalam menyelesaikan sengketa internasional. Praktik negara-negara menunjukkan bahwa mereka lebih cenderung untuk menggunakan sarana negosiasi sebagai langkah awal untuk menyelesaikan sengketanya.²⁵

Tujuan perundingan tidak harus selalu dan secara khusus menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi. Suatu perundingan yang berhasil menelorkan suatu pengaturan baru akan dapat mencegah atau meredakan situasi sengketa yang potensial.²⁶

Cara inilah yang sementara dilakukan Indonesia dalam hal menentukan batas lautnya dengan Timor Leste namun perundingan sampai sekarang belum menemukan hasil yang signifikan dalam pembagian batas laut wilayah antara kedua negara tersebut, jadi untuk sementara masih dilakukan negosiasi dengan Timor Leste.

2.5.1.2. *Mediasi dan Jasa-Jasa Baik*

Mediasi dan Jasa-jasa Baik merupakan mekanisme dalam penyelesaian sengketa yang menggunakan keterlibatan pihak ketiga. Pada suatu sengketa terkadang para pihak sulit untuk diajak negosiasi karena tensinya yang semakin meningkat. Pada titik itulah pihak ketiga hadir dengan keyakinan untuk menyelesaikan perbedaan klaim antara pihak yang bersengketa.²⁷

²⁵ Huala Adolf, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika: Bandung, hlm. 26

²⁶ Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 197

²⁷ Hilton Tarnama Putera dan Eka An Aqimuddin, *Op.Cit.*, hlm. 10

Dalam hal pihak ketiga hanya bertindak sebagai pelaku mediasi (*mediator*) komunikasi bagi pihak ketiga untuk mencarikan negosiasi-negosiasi, maka peran dari pihak ketiga disebut sebagai “*good office*”. Seorang mediator merupakan pihak ketiga yang memiliki peran yang aktif untuk mencari solusi yang tepat untuk melancarkan terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai.²⁸

2.5.1.3. *Pencarian Fakta*

Salah satu penyebab munculnya sengketa antar negara adalah karena adanya ketidaksepakatan para pihak mengenai fakta. Karena itu metode ini dibutuhkan untuk menemukan fakta-fakta yang benar-benar terjadi. Mekanisme ini biasanya dilakukan apabila cara negosiasi dan konsultasi tidak berhasil menemukan solusi atas sebuah sengketa.²⁹

Para pihak yang bersengketa dapat pula menunjuk suatu badan independen untuk menyelidiki fakta-fakta yang menjadi sebab sengketa. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan laporan kepada para pihak mengenai fakta yang ditelitinya. Dengan adanya pencarian fakta-fakta demikian, diharapkan proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dapat segera diselesaikan.³⁰

Dari segi istilah untuk “Pencarian Fakta” yang mempunyai arti yang sama dan sering kali tertukar pada saat penggunaanya yaitu *Inquiry* dan *fact-finding*.

²⁸ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Adiatama: Bandung, hlm. 227

²⁹ Hilton Tarnama Putera dan Eka An Aqimuddin, *Op.Cit.*, hlm. 9

³⁰ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 29

2.5.1.4. *Konsiliasi*

Konsiliasi menurut *the Institute of International Law* melalui *the Regulations on the Procedure of International Conciliation* yang diadopsinya pada tahun 1961 dalam Pasal 1 dinyatakan : “sebagai suatu metode penyelesaian pertikaian bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik sifatnya permanen atau sementara berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian”.³¹ Sama halnya dengan mediasi konsiliasi merupakan metode penyelesaian sengketa dengan mengabungkan antamediasi dan pencarian fakta, metode ini memerlukan pihak ketiga yang setingkat dengan arbitrase.

Perbedaanya adalah konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal dibandingkan dengan mediasi. Karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.³²

2.5.2. **Secara Hukum**

Dalam hal tidak tercapai suatu kesepakatan dalam penyelesaian sengketa secara damai, maka para pihak dapat menggunakan prosedur wajib yang menghasilkan keputusan yang mengikat. Bab XV khususnya

³¹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 229

³² Hilton Tarnama Putera dan Eka An Aqimuddin, *Op.Cit.*, hlm. 11

Pasal 287 UNCLOS 1982 menyediakan empat forum yang dapat dipilih untuk penyelesaian sengketa yaitu: ³³

1. Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea-ITLOS*);
2. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice-ICJ*);
3. Mahkamah Arbitrase (*Arbitral Tribunal*), dan
4. Mahkamah Arbitrase Khusus (*Special Arbitral Tribunal*).

Akan tetapi, disini penulis hanya membahas dua proses penyelesaian yang sering digunakan tiap negara yang ini menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum yaitu:

1. Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea-ITLOS*).
2. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice-ICJ*).

2.5.2.1. *Mahkamah Internasional Hukum Laut*

Disamping melahirkan Konvensi Hukum Laut 1982, dalam hal penyelesaian sengketa laut PBB juga turut serta melahirkan sebuah badan peradilan yang khusus menangani sengketa hukum laut.

Tribunal ini dibentuk pada tanggal 1 agustus 1996 dan berkedudukan di Hamburg, Jerman. Tujuannya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa berhubungan dengan interpretasi dan pelaksanaan konvensi. Dapatlah dikatakan bahwa pembentukan tribunal ini mencerminkan bahwa

³³ Bernard Sipahutar, 2008, **Makalah**: *Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Kerangka UNCLOS*, Fakultas Hukum Universitas Jambi: Jambi, hlm.9

sengketa hukum laut ditempatkan pada suatu sistem tersendiri mengingat karakter khusus yang dimiliki hukum laut. Tribunal ini mempunyai 21 hakim independen, masing-masingnya dipilih untuk periode 9 tahun dan dibagi dalam 5 kamar (*Chambers*): *the Chambers of Summary Procedure*, *the Chamber for Fisheries Dispute*, *the Chamber for Marine Environmental Disputes*, *the Seabed Disputes Chamber* dan satu kamar khusus yang membahas masalah *Conservation and Sustainable Exploitation of Swordfish Stocks* di *South-Eastern Pacific Ocean*. Kamar ini menyangkut konservasi dan eksploitasi yang berkesinambungan dari stok ikan todak.³⁴

2.5.2.2. *Mahkamah Internasional*

Salah satu alternatif penyelesaian secara hukum atau *judicial settlement* dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui badan peradilan internasional (*world court* atau *international court*).³⁵ Meskipun demikian Mahkamah Internasional ini berperan aktif dalam penyelesaian sengketa di jalur hukum dan putusan hakim di pengadilan tersebut bersifat mengikat.

Hal ini dimaksudkan agar setiap sengketa yang terjadi tidak mengarah pada penggunaan kekerasan bersenjata. Lembaga tersebut berwenang untuk menyelesaikan semua sengketa hukum yang terjadi.³⁶ Namun dalam mengajukan gugatan ke mahkamah internasional menjadi suatu keharusan para pihak sengketa menyetujui kasusnya di ajukan ke

³⁴ Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 420

³⁵ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 58

³⁶ Hilton Tarnama Putera dan Eka An Aqimuddin, *Op.Cit.*, hlm. 13

mahkamah internasional dikarenakan pengadilan ini bersifat fakultatif. Hal ini merupakan prinsip kedaulatan suatu negara.

Seperti contoh kasus yang pernah hangat ditelinga masyarakat Indonesia dengan Malaysia di tahun 2002. Mengenai kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang dimenangkan oleh Malaysia di mahkamah internasional, meskipun keputusannya disini merugikan pihak Indonesia tapi kedua negara yang bertikai harus menerima keputusan tersebut karena kekuatan hukum dari putusan mahkamah internasional bersifat mengikat (*binding*). Karena putusan mahkamah internasional memenangkan pihak Malaysia, maka sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua kepala pemerintahan Indonesia berkewajiban untuk menerima dan menghormati hak kepemilikan Malaysia atas kedua pulau yang merupakan zona perbatasan (*frontiers*) meskipun sebelumnya dapat dipakai sebagai titik garis pangkal kepulauan Indonesia.³⁷

³⁷ Marcel Hendrapati, 2013, *Implikasi Kasus Sipadan dan Ligitan Atas Titik Pangkal dan Delimitasi Maritim*, Arus timur: Makassar, hlm. 1

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin;
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Perpustakaan Badan Informasi Geospial;
4. Perpustakaan Kementrian Luar Negeri.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data menjadi sumber informasi yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah:

Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang ahli dibidangnya dan diinstansi khusus yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan, artikel serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah berupa penelitian kepustakaan (*literature research*) yaitu penelitian dengan mempelajari bahan bacaan yang penulis peroleh baik berupa

buku-buku ilmiah, laporan-laporan, data dari internet, serta bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.4. Analisis Data

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang sifatnya *kualitatif* maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup, data tersebut diolah dan dianalisis secara *deduktif* yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus. Dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Geografis Timor Leste

Secara geografis, negara yang pernah menjadi provinsi ke-27 Indonesia merupakan daratan yang berbatasan langsung dengan provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus merupakan daratan yang terletak ujung paling timur pulau Timor, negara ini membentang antara garis $123^{\circ} 25'$ dan $127^{\circ} 19'$ Bujur Timur (BT) dan antara $8^{\circ} 17'$ dan $10^{\circ} 22'$ Lintang Selatan (LS).



Gambar 1: Peta Timor Leste

Sumber : <http://www.slideshare.net/chintrosageografi-regional-asia-tenggara-timor-leste>

Luas keseluruhan wilayah Timor Timur lebih kurang 14.609,38 km² (kurang lebih 0,78% luas wilayah Indonesia atau 30% luas Pulau Jawa), yang meliputi wilayah daratan seluas 13.670 km², wilayah Oekusi (wilayah enklave di provinsi NTT) seluas 787,50 km², pulau Atauro seluas 140,625 km², dan Pulau Jaco seluas 11,250 km².³⁸

Wilayah Timor Timur mempunyai batas-batas sebagai berikut: disebelah utara berbatasan dengan selat Ombai (yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten Alor di provinsi NTT) dan selat Wetar yang merupakan bagian dari wilayah provinsi Maluku, sama dengan bagian timurnya langsung berhadapan dengan laut Banda yang berada di provinsi yang sama. Disebelah timur dengan laut Arafura dan kepulauan Leti Maluku Tenggara, di sebelah selatan dengan laut Timor, disebelah Barat dengan provinsi NTT. Sementara Ambenu (Oekusi) berada diluar batas-batas itu, karena berada di dalam wilayah provinsi NTT.³⁹

◆	Distrik	◆	Ibukota	◆	Luas (km ²)	◆	Households	◆	Populasi (Sensus 2004)	◆	Populasi (Perkiraan 2008)	◆	Kepadatan penduduk (2004) (/km ²)	◆
1	Lautém		Lospalos		1.702		12.998		55.921		65.349		32.9	
2	Baucau		Baucau		1.494		22.659		100.326		113.748		67.2	
3	Viqueque		Viqueque		1.781		15.115		65.245		72.950		36.6	
4	Manatuto		Manatuto		1.706		8.338		36.719		41.217		21.5	
5	Dili		Dili		372		31.575		173.541		212.469		466.5	
6	Aileu		Aileu		729		7.745		37.926		45.724		52.0	
7	Manufahi		Same		1.325		8.901		44.950		53.995		33.9	
8	Liquiçá		Liquiçá		543		11.063		54.834		69.925		101.0	
9	Ermera		Gleno		746		21.165		103.199		118.671		138.3	
10	Ainaro		Ainaro		797		11.527		52.476		62.407		65.8	
11	Bobonaro		Maliana		1.368		18.397		83.034		93.787		60.7	
12	Cova Lima		Suai		1.226		11.820		52.818		62.764		43.1	
13	Oecusse		Pante Macassar		815		13.659		57.469		67.736		70.5	

Tabel 1: *Distrik Timor Leste*

Sumber : <httpwww.slideshare.net/chintrosageografi-regional-asia-tenggara-timor-leste>

³⁸ Marnixon R.C. Wila, 2006, *Konsepsi Dalam Pengaturan Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antarneegara*, Alumni: Bandung, hlm. 53

³⁹ *Ibid.*,

Republik Demokratik Timor-Leste memiliki sistem pemerintahan parlementer dengan menganut *unicameral legislature system*. Kepala Negara dijabat oleh seorang Presiden, sedangkan Perdana Menteri memimpin Pemerintahan. Salah satu persyaratan menjadi pemilih adalah berusia 18 tahun ke atas. Secara administratif, Timor-Leste terbagi dalam 13 distrik (setingkat kabupaten) meliputi Distrik Lautem, Baucau, Viqueque, Manatuto, Manufahi, Ainaro, Dili, Aileu, Ermera, Liquica, Bobonaro, Covalima dan Oecusse. Sebagian besar Timor-Leste merupakan wilayah pegunungan dimana hanya sedikit wilayah yang relatif mendatar, terutama di sepanjang pantai. Kondisi topografi ini menyebabkan sulitnya pengelolaan lahan secara optimal terutama untuk kepentingan pertanian dan akses transportasi antar-wilayah. Padahal, lebih dari 90 persen rumah tangga dan desa di Timor-Leste mengandalkan pertanian subsistem sebagai mata pencaharian utama. Kesulitan akses ke pasar menyebabkan perkembangan pembangunan di hampir seluruh distrik cenderung lambat, dimana aktivitas dan penduduk sebagian besar terkonsentrasi di Ibukota Dili.⁴⁰

⁴⁰ Sonny Harry B. Harmadi, 2012, *Timor-Leste Menatap Masa Depan*, diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2012/03/120316_timor_analysis.shtml [05 Desember 2014]

No	Nama Perbatasan Kabupaten	Panjang Garis Perbatasan Kabupaten
1	Sumba Barat dan Sumba Timur	85 km
2	Manggarai dan Ngada	63 km
3	Ngada dan Ende	27,7 km
4	Ende dan Sikka	42 km
5	Sikka dan Flores Timur	30,2 km
6	Kupang dan TTS	116,2 km
7	Kupang dan Oekusi/Timor Leste	10,5 km
8	TTU dan TTS	65,5 km
9	TTU dan Oekusi/Timor Leste	88 km
10	TTU dan Belu	233,5 km
11	Belu dan Negara Timor Leste	127 km
13	Kab. Kupang dan Kodya Kupang	37 km

Tabel 2: *Daftar Panjang Garis Perbatasan Kabupaten Provinsi NTT*

Sumber : Sobar Sutisna (ed), (2004), (2004: 152)

Khususnya Distrik Oekusi ketika masih berintegrasi dengan NKRI merupakan kabupaten Ambenu yang beribukota Oekusi di provinsi Timor Timur yang berada dalam wilayah provinsi NTT, tepatnya berada dan dikelilingi oleh wilayah kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) di sebelah timur dan selatan, wilayah kabupaten Kupang di sebelah barat dan selatan, dan selat Ombai (bagian dari wilayah kabupaten Alor) di sebelah utara. Artinya, Distrik Oekusi menjadi wilayah enklave (daerah kantong dari negara Timor Leste (dulu provinsi yang berada di dalam wilayah provinsi NTT).⁴¹

⁴¹ Marnixon R.C. Wila, *Op.Cit.*, hlm. 53- 54

4.2.Konsepsi Wilayah Perbatasan

Perbatasan secara umum merupakan sebuah garis demarkasi antara kedua negara yang masing-masing memiliki kedaulatan. Pada mulanya perbatasan sebuah negara atau *state border* terbentuk seiring dengan lahirnya suatu negara baru. Sebelumnya penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan adanya perbedaan wilayah perbatasan tersebut, bahkan tidak jarang masyarakat berasal dari etnis yang sama. Oleh karena itu, dengan munculnya negara baru, mereka terpisahkan dan dengan adanya negara baru mereka mempunyai status kewarganegaraan yang berbeda.

Menurut pendapat ahli geografi politik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *boundaries* dan *frontier*. Kedua definisi ini mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Perbatasan disebut *frontier* karena posisinya yang terletak di depan (*front*) atau di belakang (*hinterland*) dari suatu negara. Oleh karena itu, *frontier* dapat juga disebut dengan istilah *foreland*, *borderland*, ataupun *march*. Sedangkan istilah *boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) suatu unit politik, dalam hal ini adalah negara. Semua yang terdapat di dalamnya terikat menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh serta saling terintegrasi satu dengan

yang lain . *Boundary* paling tepat dipakai apabila suatu negara dipandang sebagai unit spasial yang berdaulat.⁴²

Adapun beberapa pendapat para ahli geopolitik mengenai *boundaries* dan *frontier* antara lain sebagai berikut :

Menurut A.E.Moodie dalam Bahasa Inggris bahwa:⁴³

Perbatasan memiliki dua istilah, yaitu *boundaries* dan *frontier*. Dalam bahasa sehari-hari, kedua istilah tersebut tidak ada bedanya, tetapi dalam perspektif geografi politik, kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan makna.

Selanjutnya menurut A. E. Moodie dalam bukunya yang berjudul, *boundaries* diartikan sebagai berikut:

Garis-garis yang mendemarkasikan batas-batas terluar dari wilayah suatu negara. Sementara, *frontier* merupakan zona (jalur) dengan lebar yang berbeda yang berfungsi sebagai pemisah dua wilayah yang berlainan negaranya.

Menurut Hans Weiger dalam bukunya yang berjudul *Principle of Political Geography* :⁴⁴

Boundaries dapat dibedakan menjadi *boundaries zone* dan *boundaries line*. *Boundaries line* adalah garis yang memisahkan batas terluar, sedangkan *boundaries zone* mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda dengan *frontier*. *Boundaries zone* diwujudkan dalam bentuk ruang yang terletak antara dua wilayah. Ruang tersebut menjadi pemisah kedua wilayah negara dan merupakan wilayah bebas.

Menurut Kristof seorang ahli geografi politik dalam sebuah bukunya yang berjudul *The Nature of Frontier and Boundaries (1982)* membedakan *boundaries* dan *frontier* sebagai berikut :⁴⁵

⁴² Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu: Yogyakarta, hlm. 63-64

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 65

1. Frontier mempunyai orientasi keluar, sedangkan boundaries lebih berorientasi kedalam. *Frontier* merupakan sebuah manifestasi dari kekuatan *sentrifugal*, sedangkan *Boundaries* merupakan manifestasi dari kekuatan *sentripetal*. Perbedaan ini bersumber pada perbedaan orientasi antara *frontier* dan *boundaries*;
2. Frontier merupakan suatu faktor integrasi antara negara-negara tersebut di satu pihak, sedangkan boundaries merupakan suatu faktor pemisah. Boundaries berupa zona transisi antara suasana kehidupan yang berlainan, yang juga mencerminkan kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan dari negara yang saling berbatasan. Sedangkan frontier masih memungkinkan terjadinya interpenetrasi pengaruh antardua negara yang berbatasan/bertentangga.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut maka yang dimaksud wilayah perbatasan adalah wilayah geografis yang berhadapan/bersebelahan dengan negara tetangga yang masyarakatnya terhubung melalui hubungan sosio-ekonomi dan sosio-budaya setelah adanya persetujuan antarnegara yang berbatasan. Oleh karena itu, dalam menetapkan suatu garis pangkal dalam menentukan perlu adanya sebuah kesepakatan yang mendahuluinya agar tidak terjadi klaim tumpang tindih antar kedua negara tersebut.

Untuk melangkah pada pola-pola pengelolaan perbatasan, maka kita melihat lebih dahulu teori pengelolaan perbatasan yang ada. Untuk memetakan model-model pengelolaan perbatasan, maka kita dapat memanfaatkan teori yang dikemukakan oleh Stephen B Jones yaitu *theory Boundary Making* yang membagi ruang lingkup pengelolaan perbatasan ke dalam empat bagian: yaitu *Allocation*, *Delimitation*, *Demarcation*, dan *Administration*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:⁴⁶

1. *Allocation* atau Alokasi dalam hal ini, ruang lingkup wilayah ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum nasional dan hukum internasional. Bagi Indonesia, cakupan wilayahnya adalah seluruh wilayah yang diwariskan dari penjajah Belanda, sesuai dengan prinsip internasional *Uti Posseditis Juris* yang menyatakan bahwa suatu negara mewarisi yang berasal dari negara yang pernah menjajah;
2. *Delimitation* atau Penetapan Batas: Setelah ruang lingkup wilayah diketahui, maka tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi area-area yang *overlapping* atau harus ditentukan batas-batasnya dengan negara tetangga;
3. *Demarcation* atau Penegasan Batas: setelah garis batas ditetapkan oleh pemerintah negara yang saling berbatasan, maka tahap berikutnya adalah menegaskan batas-batas di lapangan. Karena garis batas tersebut yang sangat penting, yaitu sebagai penanda

⁴⁶ Ludiro Madu (ed), 2010, *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Graha Ilmu: Yogyakarta, hlm. 111

mulai dan berakhirnya hak dan kewajiban suatu negara, maka letak pasti batas tersebut harus dipertegas. Cara-cara yang dilakukan adalah dengan memasang tanda-tanda batas di sepanjang garis batas yang telah diperjanjikan. Kerumitan dapat terjadi di tahap ini, karena sering pada kenyataannya perubahan alam dan perbedaan interpretasi terhadap *treaty* dapat membuat pekerjaan penegasan batas menjadi rumit;

4. *Administration* atau Manajemen Pembangunan: sebenarnya, tahap ini merupakan tahap akhir dari pengelolaan perbatasan, tetapi menurut teori *Boundary Making*, dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang baik, dapat saja proses ini dilakukan bersamaan dengan proses ketiga yakni proses penegasan batas. Hal ini dapat dimengerti karena untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan akan melibatkan multisektor dan perencanaan yang terintegrasi dari bidang-bidang seperti politik, pertahanan, keamanan, sosial, ekonomi, budaya, hukum, lingkungan hidup, sarana dan prasarana dan lain-lain. Pada tahap ini pula terjadi kerja sama bagi pembangunan wilayah perbatasan antara kedua negara untuk bidang-bidang tersebut diatas.

Oleh karena itu, sebagai bentuk komitmen mengenai wilayah perbatasan pemerintah pusat, pada tahun 2008 pemerintah pusat menerbitkan sebuah regulasi yang mengatur tentang wilayah negara, termasuk didalamnya adalah batas wilayah negara dan pengelolaannya.

Berdasarkan Undang-undang No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang dimaksud dengan batas wilayah negara adalah garis batas yang memisahkan kedaulatan suatu negara dengan negara lain karena berdasarkan hukum internasional yang berlaku wilayah suatu negara harus memiliki batas-batas tertentu.

4.2.1. Klasifikasi Perbatasan Negara

Dari aspek geografi politik, batas wilayah negara di klasifikasikan atas dua macam, yaitu :

1. Klasifikasi Fungsional
2. Klasifikasi Morfologis

Menurut Harsthorne, klasifikasi perbatasan antarnegara secara fungsional dibedakan atas empat macam, yaitu: ⁴⁷

1. *Antesedent Boundaries*

Perbatasan ini disebut juga perbatasan duluan, dalam pengertian perbatasan yang terbentuk karena negara-negara baru yang saling mendahului memasang/menetapkan batas terluarnya. Jadi, terbentuknya perbatasan ini sebelum terjadinya bentang lahan budaya.

2. *Subsequent Boundaries*

Perbatasan yang terbentuk setelah adanya *cultural landscape* dan pembuatannya harus didasarkan atas persetujuan bersama antara dua negara. Perbatasan ini mengikuti perbedaan etnik kultural

⁴⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Loc. Cit.*, hlm. 69-70

khususnya dalam hal bahasa dan agama. Jenis perbatasan seperti ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur, sedangkan di Asia terutama di perbatasan antara India dengan Pakistan atau Bangladesh.

3. *Superimposed Boundaries*

Jenis perbatasan yang proses terbentuknya sama dengan *Subsequent Boundaries*, tetapi terdapat perbedaan pokok, yaitu *Superimposed Boundaries* tidak konform dengan pembagian sosio kultural. Hal ini disebabkan karena di luar pihak yang semestinya mengadakan perundingan atau perjanjian terdapat kekuatan-kekuatan lain dari luar yang ikut berkepentingan, kekuatan-kekuatan ini terutama yang menyangkut kekuatan yang memiliki kepentingan politik dari suatu negara.

4. *Relic Boundaries*

Perbatasan ini berupa garis yang telah kehilangan fungsi politisnya, terutama di bentang budayanya. Tipe perbatasan seperti ini biasanya terjadi pada suatu negara yang masuk kedalam wilayah negara lain, baik secara sukarela maupun melalui imperialisme. Sebagai contoh, batas yang dulu pernah ada antara Jerman Timur dan Rusia; batas antara Polandia dengan Jerman (semasa pemerintahan Hitler); dan batas antara Meksiko dan Amerika Serikat (semasa perjanjian Spanyol di Meksiko)

Selain klasifikasi fungsional, perbatasan antara negara (*International Boundaries*) dapat juga digolongkan berdasarkan morfologinya (proses terbentuknya). Berdasarkan morfologinya perbatasan dibedakan atas dua bagian, yaitu:⁴⁸

1. *Artificial Boundaries*

Perbatasan yang tanda batasnya merupakan buatan manusia. pemasangan tanda ini biasanya dilakukan setelah ada perundingan, persetujuan maupun perjanjian antarnegara. Batas buatan ini biasanya dapat berupa patok, tugu, kanal, terusan dan lain-lain.

2. *Natural Boundaries*

Perbatasan ini terbentuk karena proses alamiah dan dapat dibedakan menjadi lima tipe:

- a. Perbatasan yang berupa pengunungan
- b. Perbatasan yang berupa sungai dan laut
- c. Perbatasan yang berupa hutan, rawa-rawa, dan gurun
- d. Perbatasan geometris
- e. Perbatasan *Antrophogeografis*

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 71-75

4.2.2. Prinsip Hukum Internasional Dalam Penetapan Perbatasan Negara

Dalam perspektif hukum internasional, prinsip penetapan perbatasan negara dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Prinsip Umum
2. Prinsip Khusus

Prinsip umum dalam penetapan perbatasan negara merupakan ketentuan dasar yang dijadikan acuan dalam penyelesaian perbatasan negara secara umum.

Dalam prinsip ini terdapat dua ketentuan dasar yang menjadi landasan hukum internasional yaitu:

1. *United Nations Charter*
2. *Treaty of Amity and Cooperation In Southeast Asia.*

Ketentuan tersebut menjelaskan, bahwa dalam menyelesaikan perbatasan negara secara umum, harus dilakukan secara damai melalui perundingan, baik antarnegara yang bertikai ataupun melalui pihak ketiga dengan cara mediasi. Dengan demikian prinsip utama penyelesaian perbatasan antarnegara sebaiknya dilakukan secara damai seperti yang tercantum dalam ketentuan tersebut.

Prinsip kedua dalam penyelesaian masalah penetapan perbatasan antarnegara adalah prinsip khusus, yang dalam implementasinya dibedakan atas dua macam yaitu:

1. Prinsip Khusus Penetapan Batas Darat
2. Prinsip Khusus Penetapan Batas Maritim

Mengenai prinsip khusus dalam menetapkan batas antar negara dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Prinsip Khusus Penetapan Batas Darat⁴⁹

1. *Uti Possidentis Juris*

Prinsip ini menyatakan bahwa negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas penjajahannya;

2. *Border Stability*

Dalam penyelesaian perbatasan darat harus memperhatikan dan menjaga stabilitas kawasan perbatasan;

3. *Eternality of Boundary Treaty*

Perjanjian perbatasan antarnegara merupakan bentuk perjanjian internasional, yang tentu saja dalam pelaksanaannya mengikuti asas-asas dan kaedah yang lazim dalam hukum internasional.

b. Prinsip Khusus Penetapan Batas Maritim

Penetapan batas maritim, di laut teritorial terdapat pada pasal 15 Konvensi Hukum Laut III menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal pantai dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun di antaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah (*Median Line*) yang titik-titiknya sama jaraknya (*Equidistant*) dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur. Tetapi ketentuan di atas tidak

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 80-81

berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas.

Adapun yang perlu diperhatikan dalam menetapkan batas teritorial diantara negara-negara tetangga yaitu:

1. Penetapan batas laut teritorial dilakukan dengan lewat perundingan;
2. Dalam penetapan batas laut teritorial di antara negara yang saling berhadapan, digunakan metode *median line* untuk negara berhadapan dan metode *equidistant line* untuk negara berdampingan;
3. Ketentuan tersebut dapat tidak berlaku, apabila terdapat alasan historis atau keadaan khusus lainnya yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua negara menurut cara yang berlainan dengan ketentuan diatas.

4.3. Penetapan Batas Maritim Antara Republik Indonesia dan Timor Leste

Dapat dikemukakan bahwa berdasarkan konvensi hukum laut 1982 dan konvensi Genewa 1958 maka hukum yang berlaku untuk delimitasi landas kontinen dipisahkan dari hukum mengenai delimitasi laut territorial. Selanjutnya delimitasi zona tambahan tidak lagi disebut di dalam konvensi hukum laut 1982, dan dengan demikian aturan delimitasi yang berlaku pada zona tambahan tetap tidak jelas. Hal terpenting dapat ditemukan

dalam pasal 74 ayat 1 dan 83 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, karena kedua pasal yang terdapat dalam konvensi hukum laut 1982 merumuskan aturan yang sama untuk delimitasi maritim di landas kontinen maupun delimitasi maritim di zona ekonomi eksklusif.

Delimitas ZEE atau landas kontinen diantara negara-negara dengan pantai yang saling berhadapan atau berdampingan satu sama lain harus dilakukan melalui persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 38 statuta ICJ, agar tercapai sebuah solusi yang patut dan adil (*equitable solution*).⁵⁰

Oleh karena itu, sebelum membahas konsep delimitasi maritim, ketentuan pasal 74 ayat 1 dan pasal 83 ayat 1 konvensi hukum laut 1982 (*legislative history*) mempunyai sejarah tersendiri.

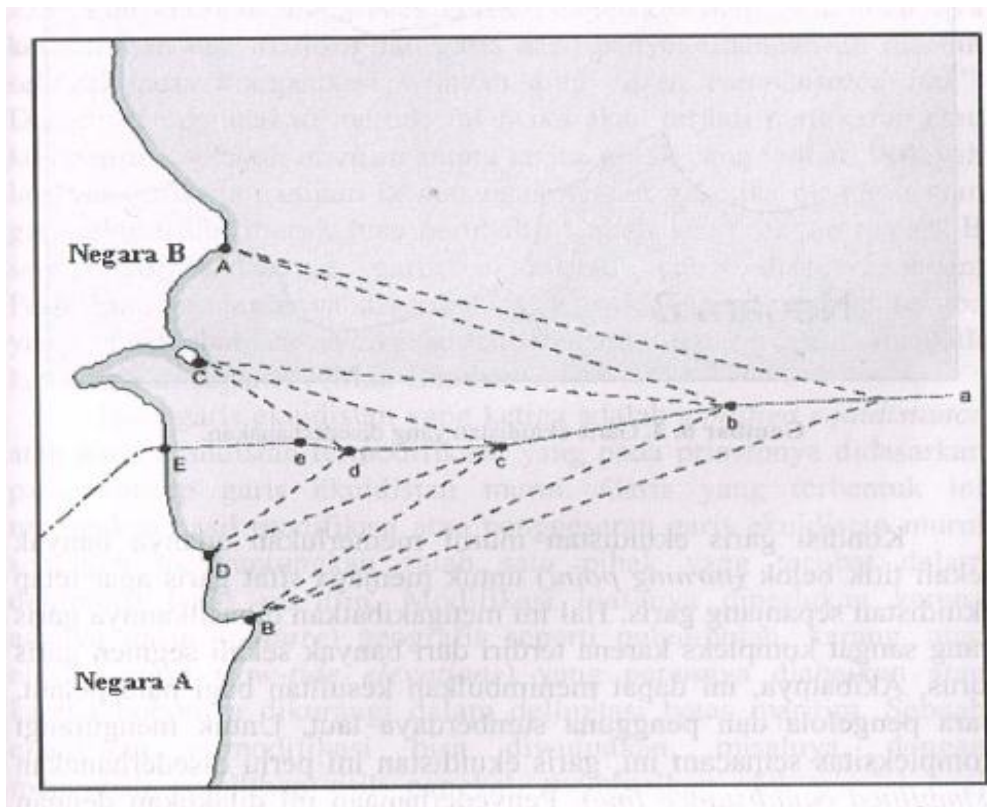
Sejak awal tidak terdapat kesepakatan di antara para pendukung “*equidistance*” dan para pendukung “*equitable principles*”, dimana pertentangan ini tampak dengan jelas melalui dua proposal yang diajukan di dalam *Negotiating Group* (NG 7) pada sidang ketujuh 1978. Salah satu usulan didasarkan atas “*equidistance*” sebagai suatu aturan umum, dan usulan ini diajukan oleh 20 negara.⁵¹

Disatu sisi ada negara yang menolak prinsip ‘*equidistance*’, dan lebih memilih prinsip ‘*equitable principle*’, karena prinsip ini lebih menguntungkan dan prinsip ini didukung oleh 27 negara :

⁵⁰ Marcel Hendrapati, *Implikasi Sipadan dan Ligitan Atas Titik Pangkal dan Delimitasi Maritim*, *Op.Cit.*, hlm. 111

⁵¹ *Ibid.*,

Delimitasi ZEE/landas kontinen di antara negara-negara yang saling berdampingan atau berhadapan satu sama lain harus dilakukan dengan persetujuan sesuai dengan '*equitable principle*', sambil memperhitungkan semua keadaan relevan dan mempergunakan setiap metode apabila perlu, guna mencapai suatu '*equitable solution*'.⁵²



Gambar 2: *Garis Equidistant Untuk Negara Berdampingan*

Sumber : I Made Andi Arsana, (2007). (2007:51)

Disini terlihat jelas adanya perbedaan mendasar dalam konsep delimitasi maritim, disatu sisi ada pihak mengusulkan '*equidistance*' karena menjamin adanya '*predictability*', sedangkan dipihak yang lain ada yang mengusulkan mengusulkan '*equitable principle*' karena prinsip ini mengutamakan fleksibilitas dan bersifat kasuistik. Oleh karena itu, dalam

⁵² *Ibid.*,

hukum internasional dalam menetapkan batas-batas maritim antara negara berdampingan maupun berhadapan terjadi dilema dalam menetapkan batas tersebut.

Dalam konvensi hukum laut III pasal 74 ayat 1 dan pasal 83 ayat 1 menjelaskan:

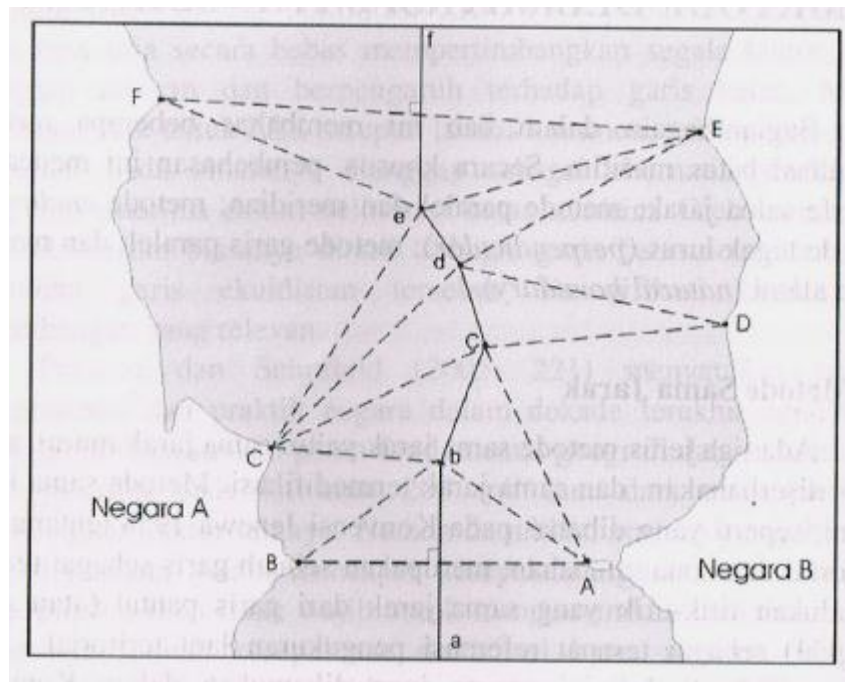
Pasal 74 ayat 1

Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam [Pasal 38](#) Statuta Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil.

Pasal 83 ayat 1

Penetapan garis batas landas kontinen antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam [Pasal 38](#) Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil.

Perlu digaris bawahi kedua pasal tersebut menimbulkan multitafsir sehingga dalam menyelesaikan kasus sengketa perbatasan laut memakan waktu yang cukup lama dikarenakan adanya perbedaan di antara para pihak tersebut, namun para pihak yang mendukung sistem *equidistance* agar segera ditetapkannya prinsip tersebut, prinsip ini memerlukan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa delimitasi sehingga cenderung bersifat memaksa. Sebaliknya para pendukung yang menerapkan '*equitable principle*' menolak adanya gagasan acara peradilan yang sifatnya memaksa.



Gambar 3: Garis Equidistant Untuk Negara Berhadapan

Sumber : I Made Andi Arsana, (2007). (2007:50)

Adanya persamaan hak dalam hal klaim maritim bagi semua negara pantai memerlukan adanya kompromi. Jika terjadi tumpang tindih klaim maritim, diperlukan adanya delimitasi batas maritim yang melibatkan negara-negara terkait baik melalui negosiasi maupun melalui pihak ketiga seperti *International Court of Justice* (ICJ). Garis yang disepakati inilah yang akan menjadi batas terluar zona maritim negara-negara tersebut. Dengan kata lain, penentuan batas terluar zona maritim sering kali tidak bisa dilakukan secara unilateral/sepihak, melainkan harus secara bilateral ataupun trilateral karena terjadinya tumpang tindih klaim antara beberapa negara.⁵³ Sebagai contoh Indonesia dengan Timor Leste, akibat lepasnya

⁵³ I Made Arsana, 2010, *Penyelesaian Sengketa Ambalat Dengan Delimitasi Maritim: Kajian Geospasial dan Yuridis*, **Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 1 No.1 Tahun 2010, Hlm. 48-49

Timor Leste dari Indonesia di tahun 1999. Ada beberapa konsekuensi internasional yang mesti diselesaikan dengan Indonesia salah satunya masalah perbatasan baik di darat maupun di laut. Penyelesaian sengkata perbatasan maritim ini harus menunggu penyelesaian penegasan batas darat antara kedua negara. Dikarenakan hingga saat ini batas darat yang terselesaikan baru 97 persen. Oleh karena itu, perundingan mengenai batas maritim belum dimulai. Hal ini dikarenakan batas laut merupakan kelanjutan dari batas darat.

4.4. Penetapan Batas Laut Wilayah Menurut Hukum Nasional

Dalam hukum nasional Indonesia penetapan batas laut wilayah tertuang dalam peraturan pemerintah, PP No 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, dan Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2008 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 tahun 2002 tentang “Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.”

Berdasarkan UU No. 6 tahun 1996 dan PP No.38 tahun 2002 dapat dikatakan bahwa seluruh batas maritim yang cukup ditetapkan secara unilateral menurut ketentuan UNCLOS telah ditetapkan, yaitu mencakup batas laut dan garis pangkal, serta batas-batas wilayah selebar 12 mil laut dari garis pangkal, serta batas *contiguos zone* selebar 24 mil laut, ZEE

dan landas kontinen selebar 200 mil laut dari garis pangkal. Diluar batas 200 mil laut masih dapat diklaim landas kontinen sampai maksimum 350 mil laut dari garis pangkal, bila dibuktikan terpenuhinya persyaratan yang telah diteapkan UNCLOS. Panjang 1(satu) mil laut menuntut standar internasional adalah 1852 m.⁵⁴

Adapun batas wilayah laut yang masih dilakukan delimitasi dengan negara tetangga ialah (Singapura, Malaysia, Timor Leste), batas landas kontinen (Malaysia, Filipina, Palau, Timor Leste), dan batas zona ekonomi eksklusif (India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste).

Delimitasi batas maritim antara Indonesia dan Timor Leste terdiri dari beberapa tahap. Tahapan tersebut meliputi deskripsi titik pangkal dan garis pangkal, pengkajian atas klaim tumpang tindih, penarikan garis ekuidistan murni, dan akhirnya menentukan kemungkinan garis batas maritim final berdasarkan berbagai keadaan yang relevan.⁵⁵

Menentukan titik pangkal dan garis pangkal merupakan langkah paling penting sebelum delimitasi batas maritim karena garis pangkal akan menjadi referensi pengukuran garis delimitasi. Indonesia, dalam hal ini sudah menentukan titik pangkal dan garis pangkal di seluruh kepulauan Indonesia. Koordinat titik-titik pangkal tersebut dimuat dalam Peraturan pemerintah (PP) No. 38/2002. Sayangnya, titik pangkal yang termuat dalam PP tersebut belum melingkupi kepulauan Indonesia secara

⁵⁴ Sobar Sutisna (ed), 2004, *Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia*, Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional, Bogor, Hlm. 44

⁵⁵ I Made Arsana, 2007, *Batas Maritim Antar Negara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, hlm. 170

keseluruhan. Disisi lain, Timor Leste belum memiliki peraturan atau ketentuan hukum yang terkait dengan koordinat titik pangkal negara tersebut. Oleh karena itu, titik pangkal dan garis pangkal baru perlu ditentukan, terutama dikawasan perbatasan maritim antara Indonesia dan Timor Leste untuk kepentingan kajian ini. Dengan demikian, delimitasi batas maritim antara kedua negara akan mempertimbangkan titik pangkal dan garis pangkal yang sudah ada dan yang baru hasil simulasi.⁵⁶

Dalam PP No 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan, menjelaskan tentang penarikan garis pangkal yang tertuang dalam pasal 2 ayat 1:

“Pemerintah menarik Garis Pangkal Kepulauan untuk menetapkan lebar laut teritorial.”

Dalam hal ini garis pangkal tidak hanya satu melainkan ada enam, apabila pemerintah melakukan penarikan garis pangkal lurus kepulauan maka terjadi tumpang tindih antara negara Timor Leste dengan Indonesia. Namun ketakutan pemerintah akan terjadinya *overlapping* antara kedua negara bisa teratasi dikarenakan kondisi geografis Indonesia dengan Timor Leste sangatlah berbeda, Indonesia sebagai Negara Kepulauan (*Archeipelagic State*) sedangkan Timor Leste itu sendiri merupakan Negara Pantai Biasa (*Coastal State*). Oleh karena itu, metode penarikan garis pangkal kedua negara berbeda satu sama lain.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 170

Berikut ini merupakan tabel ukuran garis Pantai di Provinsi Nusa Tenggara Timur

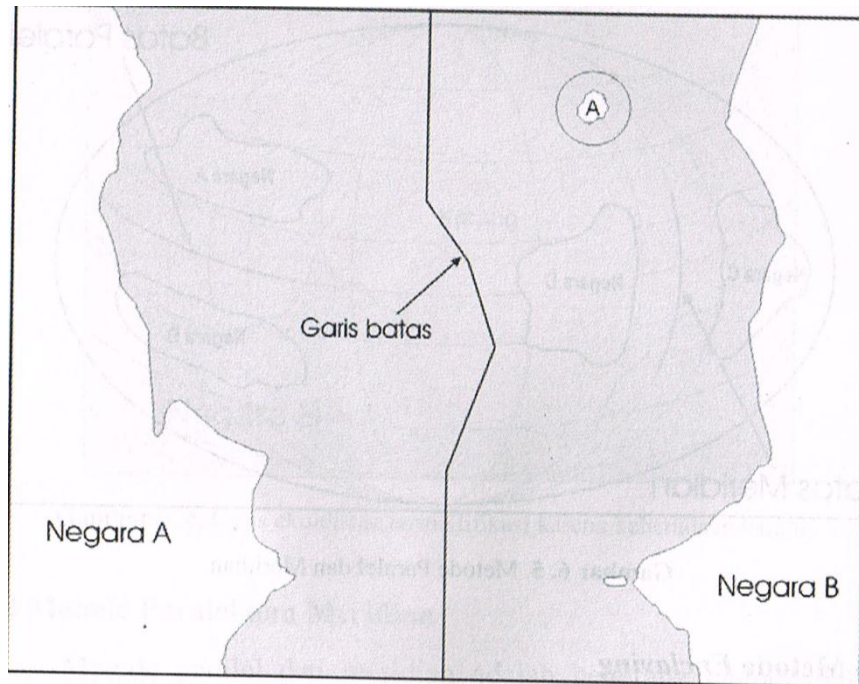
No	Nama Kota atau Kabupaten	Panjang Garis Pantai
1	Timur Tengah Utara	45 km
2	Belu	73.9 km
3	Kupang	315 km
4	Rote	338 km
5	Sabu	93 km
6	Lembata	328 km
7	Adonora	109 km
8	Solor	92,5 km
9	Pantar	168 km
10	Alor	285 km
11	Flores Timur	229 km
12	Maumere	191,5 km
13	Ngada	188 km
14	Ende	204 km
15	Manggarai	397 km
16	Sumba Barat	250,5 km
17	Sumba Timur	375,5 km
18	Kodya Kupang	20,2 km

Tabel 3: *Ukuran Garis Pantai Provinsi Nusa Tenggara Timur*

Sumber : Sobar Sutisna (ed), (2004), (2004: 152)

Dalam wawancara saya bersama bapak Eko Artanto Selaku Surveyor Pemetaan Madya Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah, menerangkan mengenai masalah overlapping batas maritim sebenarnya tidak jadi masalah seperti kepemilikan Pulau Alor, Pulau Wetar, Pulau Leti, Pulau Kisar, namun masalahnya terdapat di perbatasan darat khususnya di distrik Oecussi. Yang ditakutkan dalam klaim perbatasan ini adanya potensi akan hilangnya Pulau Batek yang terletak di barat laut masuk kedalam negara Timor Leste, tapi ketakutan tersebut hilang. Dari tahun

2002-2014 pihak Bakosurtanal itu sendiri akan mengusulkan ke pemerintah dan merundingkan batas maritim kedua negara tersebut.⁵⁷



Gambar 4:Garis Full-enclave

Sumber : I Made Andi Arsana, (2007). (2007: 56)

Dalam menetapkan garis batas maritim diantara negara berdampingan/bersebelahan, demi tercapainya *Equitable Solution* maka metode yang digunakan adalah: 1. *Equidistant Line*; 2. *Equitable Principle*. Penerapan prinsip tersebut sampai saat ini belum dibicarakan namun pemerintah Indonesia mengklaim untuk menggunakan prinsip *equidistant line* berbasis garis pangkal lurus kepulauan, sedangkan *equitable principle* itu sendiri pengaplikasiannya terhadap pulau Atauro/Kambing yang berbatasan dengan pulau Alor dan pulau Wetar dan jarak pulau Atauro itu sendiri sangatlah sempit, yang jelas dalam penerapannya pemerintah Indonesia menggunakan prinsip *equidistant line* dalam arti pemerintah

⁵⁷ Eko Artanto, Wawancara, Badan Informasi Geospasial, Bogor, 9 Januari 2015

Indonesia melakukan penarikan garis pangkal kepulauan dalam membangun garis batas maritim dengan negara tetangga sedangkan pemerintah Timor Leste menggunakan garis pangkal biasa sepanjang pantai.

Dalam hal ini Bakosurtanal selaku instansi pemerintah yang menangani pemetaan wilayah telah membuat konfigurasi peta perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, sebagai berikut :

Rancangan ini telah dibuat sejak tahun 2005 dan melahirkan *Provisional Agreement* antara kedua negara dan di tanda tangani oleh kedua Menteri Luar Negeri, sampai di akhir penghujung tahun 2013 dan saat ini permasalahan klaim perbatasan menyisahkan 3 daerah yang masih bermasalah, 2 di distrik Oecussi dan 1 di Timor Leste sendiri, namun di tahun ini pula lah kedua negara tersebut melakukan adendum terkait masalah perbatasan. Oleh karena itu, kedua negara perlu menyelesaikannya karena jikalau hal ini dibiarkan maka masalahnya semakin kompleks.

Disisi lain penetapan batas maritim kedua negara tidaklah mudah sebab ada beberapa masalah yang mesti dihadapi pemerintah terkait penetapan batas maritim ini, yaitu: ⁵⁸

1. Masalah teknis

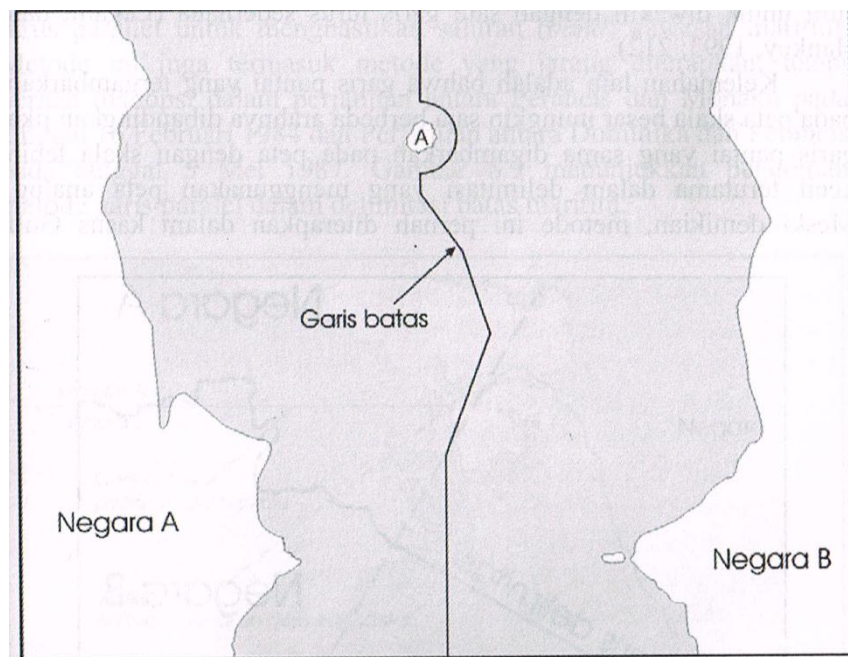
Kedua negara masih memiliki interpretasi yang berbeda khususnya di bagian enklave Oecussi karena masalah toponimi, dimana

⁵⁸ *Ibid.*,

gambar peta tidak jelas sehingga memunculkan dua interpretasi yang berbeda antara kedua negara;

2. Masalah Non Teknis

Masalah penduduk di wilayah perbatasan tersebut tidak menaati lagi sebuah perjanjian yang pernah disepakati oleh Belanda dan Portugal, terkait masalah kepemilikan tanah di wilayah perbatasan tersebut sebab para tetua adat cenderung mengabaikan perjanjian yang pernah dibuat pada masa colonial.



Gambar 5: Garis Semi-enclave

Sumber : I Made Andi Arsana, (2007). (2007: 57)

Delineasi batas daratan dengan Timor Leste relatif berjalan lancar dan untuk sementara telah diselesaikan oleh satu *Joint Technical Sub*

Committe on Border Demarcation and Regulations (JTSC-BDR) delineasi batas-batas di lapangan dari seluruh panjang garis batas.⁵⁹

Perbedaan penafsiran atas traktat 1904 dan keputusan arbitrase tahun 1914 dan peliknya reaksi masyarakat adat yang proaktif mempersoalkan masalah lokasi garis batas merupakan kendala utama dalam mencapai kesepakatan. Misalnya perbedaan nama geografis di lapangan dengan informasi dalam peta lampiran traktat, seperti status sungai besar Noel Besi, yang merupakan batas antara tanah ulayat masyarakat Amfoang di wilayah RI dengan tanah ulayat masyarakat Ambenu di Oekoesi (Timor Leste).⁶⁰

Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyelesaikan wilayah perbatasan darat terlebih dahulu karena sering terjadi konflik yang dapat membahayakan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan demikian permasalahan batas wilayah maritim mengenai kepemilikan pulau-pulau di sekitar Timor Leste tidak menjadi masalah karena pemerintah telah melakukan pengukuran yang cukup memakan waktu sehingga lahirnya sebuah konfigurasi ditahun 2005 namun yang mesti di garis bawahi konfigurasi tersebut bersifat unilateral/sepihak dari pemerintah itu sendiri. Namun masih ada masalah perbatasan *enclave* di Oecussi akibat dua kendala tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya diplomasi pemerintah untuk mempercepat proses pemetaan pulau-pulau yang berada disekitar

⁵⁹ Sobar Sutisna (ed), *Loc. Cit.*, hlm. 50

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 50

wilayah perbatasan sebagai dasar untuk membicarakan garis batas maritim dengan Timor Leste.

4.5. Upaya Pemerintah Dalam Menyelesaikan Masalah Perbatasan Dengan Timor Leste.

Negara Republik Indonesia berwenang menetapkan sendiri batas-batas wilayahnya. Tetapi karena batas terluar wilayah negara pada umumnya berbatasan dengan wilayah atau perairan dibawah kedaulatan atau yurisdiksi lain, sehingga hal ini harus diperhatikan dalam menetapkan batas-batas wilayahnya, termasuk batas-batas maritimnya (*maritime limits*).

Masalah penetapan batas maritim Indonesia dalam rangka pengelolaan laut Indonesia mencakup kebijaksanaan nasional, bilateral/regional, maupun internasional. Dalam konteks nasional, Indonesia perlu menetapkan perairan pedalaman di dalam perairan nusantara dengan menetapkan "*Closing Line*" sesuai konvensi hukum laut 1982. Namun Indonesia belum mengidentifikasi, apalagi menetapkan bagian perairan yang dapat dikategorikan sebagai perairan pedalaman tersebut di dalam wilayah perairan kepulauan.

PP No. 38 tahun 2002 tanggal 28 juni menetapkan dalam pasal 12 ayat (2) bahwa ketentuan mengenai penetapan perairan pedalaman akan diatur lebih lanjut dalam PP tersendiri. Indonesia baru saja menetapkan

183 titik-titik pangkal sebagai basis menarik garis-garis pangkal/garis-garis dasar bagi perairan nusantaranya.⁶¹

Indonesia belum menetapkan zona tambahannya di luar batas 12 mil laut wilayah, dan karena itu masih harus menetapkan perundang-undangan untuk zona tambahan ini. Walaupun Indonesia telah mengumumkan dan mengundang ZEE nya seluas 200 mil dari garis-garis pangkal lurus, maka dengan penentuan garis-garis pangkal yang baru mungkin terjadi perubahan koordinat titik terluar ZEE Indonesia.⁶² Demikian pula masalah penetapan pembagian batas maritim Indonesia dengan Timor Leste belum dapat di selesaikan akibat penetapan batas wilayah daratan kedua negara belum tuntas.

Terkait proses perundingan perbatasan antar-negara, ada banyak faktor yang mempengaruhi upaya penetapan batas-batas wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga, mulai faktor politis, juridis, ekonomis, hingga faktor yang semata-mata teknis.⁶³ Oleh sebab itu, upaya penyelesaian batas maritim Indonesia dengan negara tetangga khususnya Timor Leste perlu diintensifkan agar tidak terjadi klaim secara unilateral oleh kedua Negara yang mengakibatkan adanya bagian laut yang tumpang tindih (*overlapping*).

⁶¹ Hasjim Djalal, *Mengelolah Potensi Laut Indonesia*, **Jurnal Luar Negeri**, Departemen Luar Negeri, Vol 26 Nomor 3 September – Desember 2009, hlm. 10

⁶² *Ibid.*,

⁶³ Damos Dumoli Agusman, *Perbatasan antara Indonesia dan Negara-Negara Tetangganya : Mengapa Sulit Ditetapkan ?*, **Jurnal Diplomasi**, Departemen Luar Negeri, Vol 2 Nomor 4, Desember 2010, hlm. 5

Pemahaman nilai strategis wilayah perbatasan telah mendorong pemerintah untuk lebih serius memperhatikan wilayah yang selama ini menjadi perbatasan kedua negara tersebut. Nampak keseriusan pemerintah ketika mengambil sejumlah langkah didekati dalam dua pendekatan baik secara eksternal maupun internal.

Secara eksternal, pemerintah Indonesia telah proaktif berupaya menjalin kerja sama dengan pemerintah Timor Leste dalam masalah perbatasan kedua negara. Salah satu hasil dari diplomasi perbatasan (*border diplomacy*) ini adalah dibentuknya *Joint Border Committee* (JBC) ditingkat pusat, yang diketuai oleh Direktur Jendral Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, dan *Border Liason Committee* (BLC) pada tingkat provinsi dengan ketuanya Gubernur Provinsi NTT.⁶⁴ Pada persidangan JBC I RI-RDTL tersebut, dicapai kesepakatan untuk membentuk 4 (empat) Technical Sub-Committee (TSC) dan Border Liaison Committee (BLC), yakni: ⁶⁵

1. *Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation* (TSC-BDR) atau Sub-Komite Teknis Pengaturan Perbatasan dan Demarkasi (dikoordinir oleh Bakorsurtanal dan Ditwilhan-Dephan);
2. *Technical Sub-Committee on Cross-Border Movement of Persons and Goods, and Crossings* (TSC-CBMPGC) atau Sub-Komite

⁶⁴ Sobar Sutisna (ed), *Loc. Cit.*, hlm. 204

⁶⁵ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2007, *Kajian Optimalisasi Penanganan Wilayah Perbatasan Maritim RI-RDTL Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI*, Jakarta, hlm. 25-26

Teknis Perlintasan Orang dan Barang, serta Perlintasan Batas (dikoordinir oleh Deperindag);

3. *Technical Sub-Committee on Police Cooperation (TSC-PC)* atau Sub-Komite Teknis kerjasama Kepolisian (dikoordinir oleh Mabes Polri dan Polda NTT);
4. *Technical Sub-Committee on Border Security (TSC-BS)* atau Sub-Komite Teknis Keamanan Perbatasan (dikoordinir oleh Mabes TNI dan Pangdam IX Udayana);
5. *Border Liaison Committee (BLC)* atau Committee Perantara Perbatasan (dikoordinir oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan para anggotanya terdiri dari Pemerintah Kabupaten Perbatasan NTT dan beberapa instansi teknis di tingkat pusat selaku peninjau).

Sementara itu, pemerintah Indonesia juga melakukan pembenahan secara internal baik melalui seperangkat aturan main, kelembagaan dan paradigma dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Salah satu lompatan besar yang signifikan adalah bahwa pemerintah pasca reformasi telah mengubah paradigma dalam pengelolaan perbatasan yang tidak semata-mata mengedepankan pendekatan keamanan, tetapi juga secara bersamaan mengakomodasi pendekatan kesejahteraan. Pandangan masa lalu yang melihat wilayah perbatasan sebagai daerah rawan yang perlu mendapatkan pengawasan dan kontrol ketat. Karena menjadi tempat persembunyian para oposan pemerintah dan pemberontak sehingga

pendekatan keamanan yang dahulu diutamakan oleh pemerintah pusat dalam pembangunan wilayah perbatasan kini telah ditinggalkan.⁶⁶

Perubahan pendekatan tersebut tertuang melalui Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional 2004-2009), tujuan Perpres tersebut secara jelas diamanatkan dalam alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejaterahan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, pendekatan keamanan tidak harus dikedepankan sebab dikhawatirkan semakin banyak konflik yang terjadi di wilayah tersebut.

Upaya penyelesaian perbatasan antara kedua negara tersebut menyangkut kedaulatan masing-masing negara. Dalam hal ini pelaksanaan kedaulatan, suatu negara tidak perlu meminta izin dari negara lain untuk menjalankan kedaulatannya dalam batas-batas wilayahnya. Kedaulatan ini dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia yang meliputi daratan, perairan pedalaman (*internal water*), perairan kepulauan (*archipelagic water*), dan laut teritorial (*territorial sea*).⁶⁷

Hak berdaulat umumnya mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam di zona laut tertentu yang tidak tercakup dalam wilayah

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 205

⁶⁷ Ferry Junigwan Murdiansyah, *Penetapan Batas Maritim*, **Jurnal Luar Negeri**, Departemen Luar Negeri, Vol 26 Nomor 3, Sepetember- Desember 2009, hlm. 81-82.

kedaulatan negara. Jadi, jika terjadi perebutan kepemilikan atas pulau dan/atau klaim penguasaan sumber daya alam dan atau laut dalam wilayah 12 mil laut dari garis pangkal, maka ini adalah konflik kedaulatan dan apabila terjadi konflik atas pengelolaan kekayaan sumber daya alam dan/atau laut di luar 12 mil laut dari garis pangkal, maka hal itu merupakan konflik hak berdaulat antar negara.⁶⁸

Setelah Timor Leste merdeka, pemerintah Indonesia melakukan suatu survey guna membuat suatu konfigurasi peta pembagian batas wilayah kedua negara tersebut. Pemetaan ini bersifat unilateral/sepihak. Pemetaan ini di bantu oleh PBB, dan berfokus pada pembagian batas darat. Indonesia dan Timor Leste melakukan *Joint Occupation* guna mencapai kesepakatan mengenai batas darat. Namun karena kondisi geografis dan kultur kedua negara boleh dikatakan hampir sama, sehingga pemetaan batas darat mengalami beberapa hambatan.

Akan tetapi, perjuangan pemerintah dalam menuntaskan masalah perbatasan antar kedua negara menghasilkan semacam kesepakatan dalam bentuk *Provisional Agreement* pada 5 April 2005. Dalam perjanjian tersebut Indonesia dan Timor Leste menyepakati 907 koordinat titik-titik batas darat atau sekitar 96% dari panjang total garis batas.

Garis batas darat tersebut ada di sektor Timur (Kabupaten Belu) yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro sepanjang 149,1 km dan di sektor Barat (Kabupaten Kupang dan

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 82

Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan wilayah *enclave* Oecusse sepanjang 119,7 km.⁶⁹

Akan tetapi, pada tahap implementasi kombinasi pendekatan eksternal dan internal dalam pengelolaan perbatasan di atas ternyata sulit dan tidak semudah yang dibayangkan dalam realitasnya di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Praktik di lapangan justru memperlihatkan bahwa kombinasi pendekatan ini masih jauh dari harapan. Pada satu sisi, melalui serangkaian pembicaraan sejak tahun 2002 dalam kerangka JBC, pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah sepakat 907 titik koordinat dalam perjanjian sementara tentang perbatasan darat antara Republik Indonesia dan Timor Leste tahun 2005. Namun demikian, hingga saat ini kedua negara juga masih menghadapi sejumlah kasus yang berkaitan dengan persoalan demarkasi di beberapa segmen di perbatasan kedua negara sebagaimana yang telah diterangkan di atas.⁷⁰

Disatu sisi, upaya pemerintah untuk berorientasi pada pendekatan kesejahteraan dalam pembangunan wilayah perbatasan sebagaimana yang diwujudkan dalam dua produk hukum tersebut menunjukkan pula bahwa penerapan di lapangan masih sesuai dengan harapan. Adanya perubahan paradigma dari pendekatan keamanan ke pendekatan kesejahteraan secara umum dalam kenyataannya masih sebatas wacana.

⁶⁹ Ganewati Wuryandari, 2012, *Merajut Hubungan RI-Timor Leste dengan Perjanjian Perbatasan*, diakses dari: <http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/633-merajut-hubungan-ri-timor-leste-dengan-perjanjian-perbatasan.html> [21 Januari 2015]

⁷⁰ Sobar Sutisna (ed), *Loc. Cit.*, hlm. 206

Di perbatasan Indonesia-Timor Leste di provinsi NTT, pendekatan pendekatan pertama lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan yang kedua. Ini antara lain dapat dilihat realitasnya di lapangan, dimana banyak pos-pos perbatasan, kehadiran aparat militer dari jajaran Kopassus, Kostrad, Angkatan Laut dan Angkatan Udara di berbagai unit, sejak koramil, pos AL dan pos sektor AU serta kepolisian di tingkat polsek sangat dominan; jika dibandingkan misalnya dengan petugas sipil dalam bidang imigrasi dan bea cukai. Dari 25 pos perbatasan di wilayah Indonesia , 11 diantaranya merupakan pos TNI, 5 pos Polisi, 3 kantor Imigrasi, 3 kantor bea cukai, dan 2 pos karantina.⁷¹

Kondisi seperti itu tersebut jelas menunjukkan betapa menonjolnya pendekatan keamanan yang diterapkan di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Kuatnya pendekatan keamanan dalam mengelola wilayah perbatasan dapat kita lihat pada pintu-pintu perbatasan. Nampak jelas kewenangan satgas pengamanan perbatasan lebih besar dibandingkan institusi lainnya dalam menentukan arus lintas barang dan manusia yang melalui pintu-pintu perbatasan dari Indonesia ke Timor Leste begitu pun sebaliknya.

Akibat adanya pengutamaan pada pendekatan keamanan demi menjaga teritorial negara dan menomorduakan kepentingan warga setempat, muncullah beberapa persoalan disekitar perbatasan. Antara lain adanya pengabaian kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Sebagian besar

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 207

wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste di provinsi NTT menjadi tidak tersentuh dari dinamika pembangunan, sebagian besar wilayah tersebut masih merupakan daerah terisolasi dan tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial-ekonomi yang masih terbilang rendah.

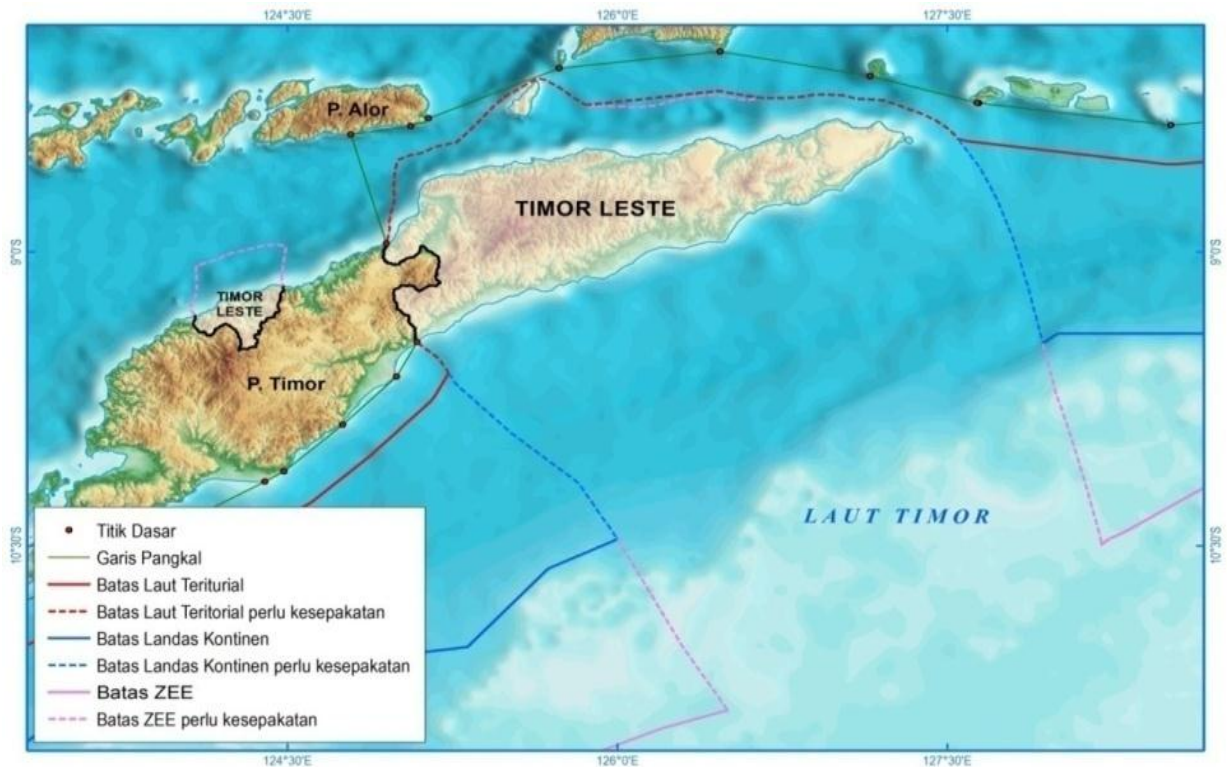
Sampai tahun 2013 upaya penyelesaian batas darat hanya menyisakan tiga daerah yang *main border* nya masih bermasalah, dua di distrik Oecussi dan satu lagi masih berada di Timor, namun permasalahan yang ada di Timor segera bisa teratasi. Upaya diplomasi ini tidak hanya berfokus pada perbatasan darat guna menyelesaikan beberapa segmen garis demarkasi yang belum disepakati kedua negara.

Dalam upaya diplomasi untuk menyelesaikan sisa segmen yang belum disepakati, hambatan yang perlu diantisipasi adalah perbedaan pola pendekatan penyelesaian yang digunakan oleh masing-masing pihak. Pihak Timor Leste dengan dipandu oleh ahli perbatasan Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan bahwa penyelesaian perbatasan hanya mengacu kepada traktat antara Belanda-Portugis tahun 1904 dan sama sekali tidak berkenan memperhatikan dinamika adat-istiadat yang berkembang di wilayah tersebut. Sementara itu, pihak Indonesia mengusulkan agar pendapat masyarakat adat ikut dipertimbangkan. Akibatnya, hingga saat ini upaya yang dilakukan masih berfokus pada diplomasi antarnegara. Perbedaan pola pendekatan ini

perlu disamakan terlebih dahulu sebelum pembahasan tentang tiga segmen batas dilanjutkan.⁷²

Kondisi geografis, sosial budaya, serta masih adanya ikatan keluarga antara masyarakat Indonesia khususnya Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste yang menjadi kendala dalam hal penetapan di wilayah perbatasan darat tersebut. Pada tahun 2002 sampai 2014 Pemerintah masih berfokus pada penyelesaian perbatasan darat yang rawan konflik namun upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan wilayah maritim rencana akan dibicarakan dengan Pemerintah Timor Leste, namun upaya diplomasi ini sudah di persiapkan di tahun 2005 dengan konfigurasi peta yang di Keluarkan oleh Badan Informasi Geospasial seperti berikut:

⁷² Sandy Nur Ikfal Raharjo, Analisis dan Upaya Penyelesaian Konflik Antara Warga Perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia dengan Warga Distrik Oecussi, Timor Leste Pada 2012-2013, **Jurnal Pertahanan**, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Vol 4 Nomor 1, Maret 2014, hlm. 170



Gambar 6: Peta Konfigurasi Badan Informasi Geospasial

Sumber: Badan Informasi Geospasial

Akan tetapi, penetapan batas wilayah maritim ini masih bersifat unilateral/sepihak dengan menggunakan metode *equidistant* hampir di setiap wilayah perbatasan maritim dan *equitable principle* khusus di Pulau Atauro Pemerintah menggunakan penarikan garis pangkal kepulauan sebagai negara kepulauan sedangkan Timor Leste menggunakan garis pangkal biasa sebagai negara pantai.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

1. Secara geografis Indonesia dengan Timor Leste Merupakan negara yang memiliki kesamaan dengan Indonesia dari segi sosial dan kultur budaya antara Timor Leste dengan Kupang NTT sehingga penetapan batas wilayah kedua negara mengalami kesulitan, bahkan menjadi hambatan yang cukup besar dalam menetapkan batas wilayah kedua negara sehingga menghabiskan banyak waktu, sebab penetapan batas maritim ini harus menunggu penyelesaian batas darat terlebih dahulu. Masalah perbatasan darat sering menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan menimbulkan korban jiwa dan kerugian pada kedua belah pihak. Penetapan batas darat dimulai sejak tahun 2005 dengan disepakatinya *Provisional Agreement* guna meredam masalah konflik yang sering terjadi di perbatasan darat sampai tahun 2013 kedua negara tersebut menyetujui 907 koordinat titik-titik batas darat atau sekitar 96% dari panjang total garis batas. Dimana masih ada tiga segmen yang mesti diselesaikan.

2. Dari tahun 2002 sampai 2014 upaya diplomasi dalam penyelesaian wilayah perbatasan antara kedua negara itu masih sering di lancarkan agar sesegera mungkin menyelesaikan perbatasan darat dan beralih ke perbatasan maritim. Akan tetapi, upaya penyelesaian batas darat sudah mencapai 96%, di tahun 2015 instansi yang menangani

pemetaan batas wilayah Badan Informasi Geospasial berencana mengusulkan konfigurasi peta Indonesia dengan Timor Leste yang telah dibuatnya di tahun 2005 dalam pertemuan kedua negara tersebut. Metode pemetaannya pun beragam menggunakan *Equidistance* dan *Equitable principle* mengingat kedua negara tersebut saling berdampingan. Akan tetapi konfigurasi peta tersebut masih bersifat unilateral atau sepihak sehingga diperlukan pembicaraan khusus antar kedua negara tersebut agar permasalahan batas negara tersebut cepat terselesaikan.

5.2. SARAN

1. Dalam penyelesaian wilayah perbatasan diperlukan adanya perlu adanya penegasan pemerintah Republik Indonesia dalam menetapkan koordinat garis pangkal dan tidak membiarkan masalah perbatasan ini berlarut-larut karena bisa mengganggu kestabilan NKRI seperti halnya pulau Sipadan dan pulau Ligitan. Oleh karena itu pemerintah hendaknya membentuk suatu satuan tugas yang khusus membidangi masalah perbatasan agar masalah ini tidak berkepanjangan.

2. Pemerintah perlu berperan aktif dalam menyelesaikan wilayah perbatasan ini dengan mengusulkan di forum internasional, dalam hal ini forum ASEAN agar dapat membentuk suatu badan yang memang bisa mengurus masalah perbatasan tersebut. Dan membuat perjanjian dengan negara tetangga, berdasarkan kaidah-kaidah hukum internasional, namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Albert W. Koers.** 1991. *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Boer Mauna.** 2011. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Alumni: Bandung
- Dikdik Mohamad Sodik.** 2011. *Hukum Laut Internasional*. Refika Adiatama: Bandung
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia.** 2007. *Kajian Optimalisasi Penanganan Wilayah Perbatasan Maritim RI-RDTL Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI*. Departemen Pertahanan Republik Indonesia: Jakarta
- Etty R.Agoes.** 1991. *Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*. Abardin: Bandung
- Frans E.Likadja.** 1987. *Bunga Rampai Hukum Internasional*. Binacipta: Bandung
- Hilton Tarnama Putera dan Eka An Aqimuddin.** 2011. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Asean Lembaga dan Proses*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Huala Adolf.** 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika: Bandung
- I Made Andi Arsana.** 2007. *Batas Maritim Antar Negara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar.** 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Refika Adiatama: Bandung
- Ludiro Madu dkk.** 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Marcel Hendrapati.** 2013. *Implikasi Kasus Sipadan dan Ligitan Atas Titik Pangkal dan Delimitasi Maritim*. Arus timur: Makassar

Marnixon R.C. Wila. 2006. *Konsepsi Dalam Pengaturan Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antarnegara*. Alumni: Bandung

Mochtar Kusumaatmadja. 2003. *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*. Alumni: Bandung

P.Joko Subagyo. 2005. *Hukum Laut Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta

Sekretariat Jendral Satuan Kerja Dewan Kelautan. 2008. *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS III) di Indonesia*. Departemen Kelautan dan Perikanan: Jakarta

Sobar Sutisna. 2004. *Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia*, Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional: Bogor

Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011. *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu: Yogyakarta

T.May Rudy. 2009. *Hukum Internasional 2*. Refika Adiatama: Bandung

Wirjono Prodjodikoro. 1970. *Hukum Laut Bagi Indonesia*. Sumur Bandung: Bandung

Jurnal/Makalah

Marcel Hendrapati. 2007. *Pemetaan Garis Pangkal Kepulauan Republik Indonesia*. **Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa**. Vol 15 No. 2 Juni

Mochtar Kusumaatmadja. 2003. *Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut Ke-III (Statement on the Third United Nations Conference on the Law of the Sea)*. **Jurnal Hukum Internasional**. Vol 1 No.1 Oktober

Rawul Yulian Rahman. 2013. *Upaya Timor Leste Dalam Penyelesaian Garis Tapal Batas Dengan Australia*. **Jurnal Hubungan Internasional**. Vol 1 No. 2

I Made Arsana. 2010. *Penyelesaian Sengketa Ambalat Dengan Delimitasi Maritim:Kajian Geospasial dan Yuridis*. **Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**. Vol 1 No.1

Bernard Sipahutar. 2008. *Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Kerangka UNCLOS*. **Makalah** Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi

Hasjim Djalal. 2009. *Mengelolah Potensi Laut Indonesia*. **Jurnal Luar Negeri**. Vol 26 No. 3

Damos Dumoli Agusman. 2010. *Perbatasan antara Indonesia dan Negara-Negara Tetangganya: Mengapa Sulit Ditetapkan?*. **Jurnal Diplomasi**, Vol 2 No. 4

Ferry Junigwan Murdiansyah. 2009. *Penetapan Batas Maritim*. **Jurnal Luar Negeri**. Vol 26 No. 3

Sandy Nur Ikfal Raharjo. 2014. Analisis dan Upaya Penyelesaian Konflik Antara Warga Perbatasan Timor Tengah Utara. Indonesia dengan Warga Distrik Oecussi. Timor Leste Pada 2012-2013. **Jurnal Pertahanan**. Vol 4 Nomor 1

Peraturan Perundang-undangan / Konvensi

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Republik Indonesia terhadap Konvensi Hukum Laut PBB III tahun 1982

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Konvensi Hukum Laut PBB III tahun 1982

INTERNET

Amril Amarullah. 2009. *Batas Maritim Indonesia-Timor Leste Tak Jelas. Pemerintah Indonesia belum merundingkan batas maritim dengan sejumlah negara tetangga*, diakses dari: <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/77313batas-maritim-indonesia-timor-leste-tak-jelas> [19 Juni 2014]

I Made Andi Arsana. 2012. Menetapkan Batas Maritim dengan Timor Leste. Di akses dari <http://puzzleminds.com/menetapkan-batas-maritim-dengan-timor-leste-2/> [12 April 2014]

Sonny Harry B. Harmadi, 2012, Timor-Leste Menatap Masa Depan, diakses dari: http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2012/03/120316_timor_analysis.shtml [05 Desember 2014]

Ganewati Wuryandari, 2012, *Merajut Hubungan RI-Timor Leste dengan Perjanjian Perbatasan*. Diakses dari: <http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/633-merajut-hubungan-ri-timor-leste-denganperjanjian-perbatasan.html> [21 Januari 2015]